



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

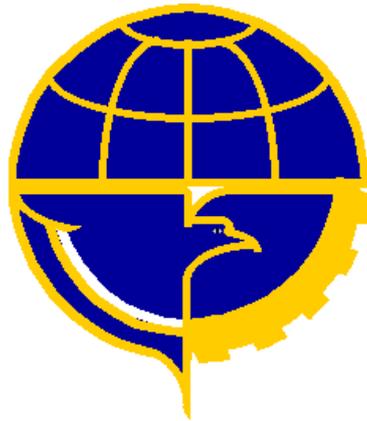


*(Audited)*

## LAPORAN KEUANGAN TA. 2013 BAGIAN ANGGARAN 022

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat

**BAGIAN ANGGARAN 022**



**LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2013  
(AUDITED)**

**Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110**

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	8
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	24
A.4. Kebijakan Akuntansi	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja Negara	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	47
C.1. Aset Lancar	47
C.2. Aset Tetap	66
C.3. Piutang Jangka Panjang	76
C.4. Aset Lainnya	77
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	80
C.6. Ekuitas Dana Lancar	80
C.7. Ekuitas Dana Investasi	82
D. Pengungkapan Penting Lainnya	83
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	83
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap	
Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)	

		<b>Hal</b>
Tabel 1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012	1
Tabel 2	: Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 2012	2
Tabel 3	: Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	26
Tabel 4	: Penggolongan Kualitas Piutang	31
Tabel 5	: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	32
Tabel 6	: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	33
Tabel 7	: Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2013 dan 2012	33
Tabel 8	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA . 2013	34
Tabel 9	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013	35
Tabel 10	: Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012	35
Tabel 11	: Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012	36
Tabel 12	: Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012	37
Tabel 13	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012	39
Tabel 14	: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012	47
Tabel 15	: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I	48
Tabel 16	: Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I	48
Tabel 17	: Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	49
Tabel 18	: Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada BPSDMP	49
Tabel 19	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	51
Tabel 20	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I	52
Tabel 21	: Besarnya Saldo Kas pada masing-masing BLU	52
Tabel 22	: Perbedaan Rincian Kas BLU Pada Laporan Neraca SAP dan Laporan Neraca BLU	53
Tabel 23	: Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I	53
Tabel 24	: Piutang Bukan Pajak per Eselon I	55
Tabel 25	: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak per Eselon I	59
Tabel 26	: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BL TP/TGR per Eselon I	62
Tabel 27	: Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker BLU	62
Tabel 28	: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Operasional BLU	63
Tabel 29	: Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	64
Tabel 30	: Rincian Persediaan per Eselon I	65
Tabel 31	: Rincian Persediaan masing-masing satker Badan Layanan Umum	65
Tabel 32	: Daftar Persediaan per 31 Desember 2013	66
Tabel 33	: Posisi Aset Tetap	66
Tabel 34	: Posisi Aset Tetap Badan Layanan Umum	67
Tabel 35	: Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2013	67
Tabel 36	: Rincian Mutasi Tanah	68
Tabel 37	: Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	69
Tabel 38	: Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	70
Tabel 39	: Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	71

Tabel 40	: Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	72
Tabel 41	: Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	73
Tabel 42	: Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I	76
Tabel 43	: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR per Eselon I	76
Tabel 44	: Rincian Aset Lainnya	77
Tabel 45	: Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I	77
Tabel 46	: Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Jenisnya	78
Tabel 47	: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I	80
Tabel 48	: Rincian Pendapatan Diterima di Muka	81
Tabel 49	: Rincian Ekuitas Dana Lancar	81
Tabel 50	: Rincian Ekuitas Dana Investasi	83

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Perhubungan adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Perhubungan. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2014

**MENTERI PERHUBUNGAN**



**E.E. MANGINDAAN**

**RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.893.404.541.039,- atau mencapai 245,19 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp 772.213.244.876,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp 31.718.259.929.128,- atau mencapai 88,29 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 35.926.285.034.100,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012

Uraian	TA 2013			TA 2012
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	772.213.244.876	1.893.404.541.039	245,19	1.331.979.615.033
Belanja Negara	35.926.285.034.100	31.718.259.929.128	88,29	30.083.615.007.934

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp 148.324.032.719.573,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 1.119.714.158.321,-, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 143.507.204.560.291,-, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) masing-masing sebesar Rp 396.493.660,- dan Rp 3.696.717.507.301,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 460.597.656.980,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp 147.863.435.062.593,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 659.116.501.341,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 147.204.318.561.252,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.  
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	31-Des-13 (Rp)	31-Des-12 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	1.119.714.158.321	767.731.313.306	351.982.845.015	45,85
Aset Tetap	143.507.204.560.291	158.623.798.919.876	(15.116.594.359.585)	(9,53)
Piutang Jangka Panjang	396.493.660	477.347.365	(80.853.705)	(16,94)
Aset Lainnya	3.696.717.507.301	4.071.774.581.032	(375.057.073.731)	(9,21)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>148.324.032.719.573</b>	<b>163.463.782.161.579</b>	<b>(15.139.749.442.006)</b>	<b>(9,26)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	460.597.656.980	143.073.581.962	317.524.075.018	221,93
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>460.597.656.980</b>	<b>143.073.581.962</b>	<b>317.524.075.018</b>	<b>221,93</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
Ekuitas Dana Lancar	659.116.501.341	624.657.731.344	34.458.769.997	5,52
Ekuitas Dana Invesrasi	147.204.318.561.252	162.696.050.848.273	(15.491.732.287.021)	(9,52)
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>147.863.435.062.593</b>	<b>163.320.708.579.617</b>	<b>(15.457.273.517.024)</b>	<b>(9,46)</b>
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>148.324.032.719.573</b>	<b>163.463.782.161.579</b>	<b>(15.139.749.442.006)</b>	<b>(9,26)</b>

### **3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006  
FAX : (021) 3451657  
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : [pusdatin@dephub.go.id](mailto:pusdatin@dephub.go.id)  
home page : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2014

**MENTERI PERHUBUNGAN**

**E.E. MANGINDAAN**

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

*(dalam Rp)*

URAIAN	CATATAN	TA 2013		% Terhadap Anggaran	TA 2012
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1.</b>				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	772.213.244.876	1.893.404.541.039	245,19	1.331.979.615.033
<b>Jumlah Pendpt Negara &amp; Hibah</b>		<b>772.213.244.876</b>	<b>1.893.404.541.039</b>	<b>245,19</b>	<b>1.331.979.615.033</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>B.2.</b>				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	2.080.598.769.100	1.950.792.958.299	93,76	1.441.874.025.790
2. Belanja Barang	B.2.2.	7.267.788.878.000	6.183.732.107.026	85,08	5.365.872.795.980
3. Belanja Modal	B.2.3.	26.577.897.387.000	23.572.271.260.744	88,69	23.198.127.579.414
4. Belanja Modal Non Kas	B.2.4.	-	11.463.603.059		77.740.606.750
<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>35.926.285.034.100</b>	<b>31.718.259.929.128</b>	<b>88,29</b>	<b>30.083.615.007.934</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Kode Lap. : LRAKKT  
Tanggal : 01 Mei 2014  
Halaman : 1  
Prog.Id : lu\_pauati

No	URAIAN	2013					2012				
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>										
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	772.213.244,876	1.893.404.541,039	1.121.191.296,163	245,19	683.052.851,436	1.331.979,615,033	648.928.763,597	195,00		
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	772.213.244,876	1.893.404.541,039	1.121.191,296,163	245,19	683.052.851,436	1.331.979,615,033	648.928.763,597	195,00		
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	772.213.244,876	1.893.404.541,039	1.121.191,296,163	245,19	683.052.851,436	1.331.979,615,033	648.928.763,597	195,00		
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
A.II	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
A.II.1	PENERIMAAN NEGARA NON KAS	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
A.II.1.a	Penerimaan Perpajakan Non Kas	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
A.II.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
A.II.2	HIBAH NON KAS	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)</b>	<b>772.213.244,876</b>	<b>1.893.404.541,039</b>	<b>1.121.191.296,163</b>	<b>245,19</b>	<b>683.052.851,436</b>	<b>1.331.979,615,033</b>	<b>648.928.763,597</b>	<b>195,00</b>		
<b>B</b>	<b>BELANJA NEGARA</b>										
B.I	BELANJA TRANSAKSI KAS	35.926.286,034,100	31.706,796,326,069	( 4.219,488,708,031)	88,26	33.918,359,368,997	30.005,874,401,184	( 3.912,484,967,813)	88,46		
B.I.1	Rupiah Murni	33.454,662,010,100	30.125,679,511,498	( 3.328,982,498,602)	90,05	31.458,489,291,997	28.585,174,810,274	( 2.873,314,481,723)	90,87		
B.I.1.a	Belanja Pegawai	2.080,598,769,100	1,950,792,958,299	( 129,805,810,801)	93,76	1,499,719,093,000	1,441,874,025,790	( 57,845,067,210)	96,14		
B.I.1.b	Belanja Barang	7,261,475,271,000	6,179,688,068,026	( 1,081,787,202,974)	85,10	6,250,298,613,582	5,363,017,252,980	( 887,281,360,602)	85,80		
B.I.1.c	Belanja Modal	24,112,587,970,000	21,995,198,485,173	( 2,117,389,484,827)	91,22	23,708,471,585,415	21,780,283,531,504	( 1,928,188,053,911)	91,87		
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	2,471,623,024,000	1,581,116,814,571	( 890,506,209,429)	63,97	2,459,870,077,000	1,420,699,590,910	( 1,039,170,486,090)	57,76		
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.I.2.b	Belanja Barang	6,313,607,000	4,044,039,000	( 2,269,568,000)	64,05	4,512,100,000	2,855,543,000	( 1,656,557,000)	63,29		
B.I.2.c	Belanja Modal	2,465,309,417,000	1,577,072,775,571	( 888,236,641,429)	63,97	2,455,357,977,000	1,417,844,047,910	( 1,037,513,929,090)	57,74		
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Kode Lap. : LRAKT  
Tanggal : 01 Mei 2014  
Halaman : 2  
Prog.Id : lu\_pauait

No	URAIAN	2013					2012				
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
B.II	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	11,463,603,059	11,463,603,059	0.00	0	77,740,606,750	77,740,606,750	0.00		
B.II.1	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.II.2	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.II.3	Belanja Modal Non Kas	0	11,463,603,059	11,463,603,059	0.00	0	77,740,606,750	77,740,606,750	0.00		
B.II.4	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.II.5	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.II.6	Hilang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.II.7	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.II.8	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	<b>JUMLAH BELANJA (B. I + B. II)</b>	<b>35,926,286,034,100</b>	<b>31,718,259,929,128</b>	<b>( 4,208,025,104,972)</b>	<b>88.29</b>	<b>33,918,359,368,997</b>	<b>30,083,615,007,934</b>	<b>( 3,834,744,361,063)</b>	<b>88.69</b>		
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>										
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
C.1.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		

JAKARTA, . . . . . MEI 2014  
MENTERI PERHUBUNGAN  
  
E. MANGINDAAN

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012**

(dalam Rp)

Uraian	Catatan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	1.167.058.545	810.754.169
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	10.121.153.259	19.029.872.722
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	424.615.684.680	3.329.183.847
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	193.152.487.378	161.040.871.577
Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum	C.1.5	25.023.013.699	0
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.6	219.863.167	160.596.995
Uang Muka Belanja (Prepayment)	C.1.7	22.216.828.700	19.835.100.558
Piutang Bukan Pajak	C.1.8	167.358.155.328	146.322.771.124
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.9	(19.276.250.570)	(28.407.901.233)
Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.10	25.703.566.497	287.903.313.703
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.11	(128.517.833)	(215.000)
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.12	2.656.899.000	1.617.931.020
Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.13	(53.146.683)	(47.951.843)
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.14	0	42.357.400
Penyisihan Piutang Tidak tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.1.15	0	(211.787)
Persediaan	C.1.16	264.005.547.156	154.789.258.848
Persediaan Badan Layanan Umum		2.931.815.998	1.305.581.206
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1.119.714.158.321</b>	<b>767.731.313.306</b>
<b>ASET TETAP</b>	C.2		
Tanah	C.2.1	57.388.535.368.980	50.201.701.857.731
Tanah Badan Layanan Umum		1.265.874.384.051	1.250.491.053.251
Peralatan dan Mesin	C.2.2	22.863.639.549.608	16.889.268.343.786
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum		1.064.403.552.977	750.047.580.208
Gedung dan Bangunan	C.2.3	9.579.087.072.196	7.819.752.237.038
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum		1.221.062.700.116	1.325.147.647.960
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	63.703.842.252.840	52.728.985.432.198
Jalan Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum		52.724.893.361	42.434.655.576
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	2.094.146.850.907	2.433.243.142.358
Aset Tetap lainnya Badan Layanan Umum		17.400.241.482	13.053.107.171
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.6	28.032.064.309.662	25.113.457.585.229
Konstruksi dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum		12.505.118.867	56.216.277.370
Akumulasi Penyusutan		(43.788.081.734.756)	0
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>143.507.204.560.291</b>	<b>158.623.798.919.876</b>

Uraian	Catatan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	C.3		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	412.578.733	479.001.363
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.2	(16.085.073)	(1.653.998)
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>396.493.660</b>	<b>477.347.365</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	2.130.288.135.264	1.886.541.933.297
Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum		76.395.841.868	42.026.303.393
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	C.4.2	16.045.930.645	0
Aset Lain-lain	C.4.3	2.000.823.341.710	2.142.196.518.442
Aset Lain-lain Badan Layanan Umum		3.143.062.801	1.009.825.900
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(529.978.804.987)	0
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>3.696.717.507.301</b>	<b>4.071.774.581.032</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>148.324.032.719.573</b>	<b>163.463.782.161.579</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	427.063.813.222	103.357.423.491
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.2	22.241.989.715	19.802.839.526
Uang Muka dari KPPN	C.5.3	1.167.058.545	810.754.169
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.5.4	10.124.795.498	19.102.564.776
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>460.597.656.980</b>	<b>143.073.581.962</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>460.597.656.980</b>	<b>143.073.581.962</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	C.6		
Cadangan Piutang	C.6.1	176.260.705.739	407.430.093.384
Cadangan Persediaan	C.6.2	266.937.363.154	156.094.840.054
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	C.6.3	(4.645.060.172)	(103.181.868.640)
Dana Lancar Badan Layanan Umum	C.6.4	218.175.501.077	161.040.871.577
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.6.5	2.193.289.391	3.080.936.942
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.6.6	22.436.691.867	19.995.697.553
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.6.7	(22.241.989.715)	(19.802.839.526)
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>659.116.501.341</b>	<b>624.657.731.344</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	C.7		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7.1	143.507.204.560.291	158.623.798.919.876
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7.2	3.697.114.000.961	4.072.251.928.397
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>147.204.318.561.252</b>	<b>162.696.050.848.273</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>147.863.435.062.593</b>	<b>163.320.708.579.617</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>148.324.032.719.573</b>	<b>163.463.782.161.579</b>

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA**  
**PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NSAIKLT  
Tanggal : 01/05/14  
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2013	2012	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,167,058,545	810,754,169	356,304,376	43.95
Kas di Bendahara Penerimaan	10,121,153,259	19,029,872,722	( 8,908,719,463)	( 46.81)
Kas Lainnya dan Setara Kas	424,615,684,680	3,329,183,847	421,286,500,833	12,654.35
Kas pada Badan Layanan Umum	193,152,487,378	161,040,871,577	32,111,615,801	19.94
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	25,023,013,699	0	25,023,013,699	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	219,863,167	160,596,995	59,266,172	36.90
Uang muka belanja (prepayment)	22,216,828,700	19,835,100,558	2,381,728,142	12.01
Piutang Bukan Pajak	167,358,155,328	146,322,771,124	21,035,384,204	14.38
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	( 19,276,250,570)	( 28,407,901,233)	9,131,650,663	( 32.14)
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>148,081,904,758</i>	<i>117,914,869,891</i>	<i>30,167,034,867</i>	<i>25.58</i>
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	25,703,566,497	287,903,313,703	( 262,199,747,206)	( 91.07)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	( 128,517,833)	( 215,000)	( 128,302,833)	59,675.74
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	<i>25,575,048,664</i>	<i>287,903,098,703</i>	<i>( 262,328,050,039)</i>	<i>( 91.12)</i>
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	2,656,899,000	1,617,931,020	1,038,967,980	64.22
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	( 53,146,683)	( 47,951,843)	( 5,194,840)	10.83
<i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i>	<i>2,603,752,317</i>	<i>1,569,979,177</i>	<i>1,033,773,140</i>	<i>65.85</i>
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	0	42,357,400	( 42,357,400)	( 100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	0	( 211,787)	211,787	( 100.00)
<i>Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)</i>	<i>0</i>	<i>42,145,613</i>	<i>( 42,145,613)</i>	<i>( 100.00)</i>
Persediaan	264,005,547,156	154,789,258,848	109,216,288,308	70.56
Persediaan Badan Layanan Umum	2,931,815,998	1,305,581,206	1,626,234,792	124.56
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1,119,714,158,321</b>	<b>767,731,313,306</b>	<b>351,982,845,015</b>	<b>45.85</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	57,388,535,368,980	50,201,701,857,731	7,186,833,511,249	14.32
Tanah Badan Layanan Umum	1,265,874,384,051	1,250,491,053,251	15,383,330,800	1.23
Peralatan dan Mesin	22,863,639,549,608	16,889,268,343,786	5,974,371,205,822	35.37
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	1,064,403,552,977	750,047,580,208	314,355,972,769	41.91
Gedung dan Bangunan	9,579,087,072,196	7,819,752,237,038	1,759,334,835,158	22.50
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	1,221,062,700,116	1,325,147,647,960	( 104,084,947,844)	( 7.85)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	63,703,842,252,840	52,728,985,432,198	10,974,856,820,642	20.81

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA**  
**PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NSAIKLT  
 Tanggal : 01/05/14  
 Halaman : 2

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2013	2012	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	52,724,893,361	42,434,655,576	10,290,237,785	24.25
Aset Tetap Lainnya	2,094,146,850,907	2,433,243,142,358	( 339,096,291,451)	( 13.94)
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	17,400,241,482	13,053,107,171	4,347,134,311	33.30
Konstruksi Dalam Pengerjaan	28,032,064,309,662	25,113,457,585,229	2,918,606,724,433	11.62
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	12,505,118,867	56,216,277,370	( 43,711,158,503)	( 77.76)
Akumulasi Penyusutan	( 43,788,081,734,756)	0	( 43,788,081,734,756)	0.00
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>143,507,204,560,291</b>	<b>158,623,798,919,876</b>	<b>( 15,116,594,359,585)</b>	<b>( 9.53)</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	412,578,733	479,001,363	( 66,422,630)	( 13.87)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	( 16,085,073)	( 1,653,998)	( 14,431,075)	872.50
<i>Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	396,493,660	477,347,365	( 80,853,705)	( 16.94)
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>396,493,660</b>	<b>477,347,365</b>	<b>( 80,853,705)</b>	<b>( 16.94)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	2,130,288,135,264	1,886,541,933,297	243,746,201,967	12.92
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum	76,395,841,868	42,026,303,393	34,369,538,475	81.78
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	16,045,930,645	0	16,045,930,645	0.00
Aset Lain-lain	2,000,823,341,710	2,142,196,518,442	( 141,373,176,732)	( 6.60)
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	3,143,062,801	1,009,825,900	2,133,236,901	211.25
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	( 529,978,804,987)	0	( 529,978,804,987)	0.00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>3,696,717,507,301</b>	<b>4,071,774,581,032</b>	<b>( 375,057,073,731)</b>	<b>( 9.21)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>148,324,032,719,573</b>	<b>163,463,782,161,579</b>	<b>( 15,139,749,442,006)</b>	<b>( 9.26)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	427,063,813,222	103,357,423,491	323,706,389,731	313.19
Pendapatan Diterima Dimuka	22,241,989,715	19,802,839,526	2,439,150,189	12.32
Uang Muka dari KPPN	1,167,058,545	810,754,169	356,304,376	43.95
Pendapatan Yang Ditangguhkan	10,124,795,498	19,102,564,776	( 8,977,769,278)	( 47.00)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>460,597,656,980</b>	<b>143,073,581,962</b>	<b>317,524,075,018</b>	<b>221.93</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>460,597,656,980</b>	<b>143,073,581,962</b>	<b>317,524,075,018</b>	<b>221.93</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>				
Cadangan Piutang	176,260,705,739	407,430,093,384	( 231,169,387,645)	( 56.74)
Cadangan Persediaan	266,937,363,154	156,094,840,054	110,842,523,100	71.01
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	( 4,645,060,172)	( 103,181,868,640)	98,536,808,468	( 95.50)
Dana Lancar BLU	218,175,501,077	161,040,871,577	57,134,629,500	35.48

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA**  
**PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NSAIKLT  
 Tanggal : 01/05/14  
 Halaman : 3

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2013	2012	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	2,193,289,391	3,080,936,942	( 887,647,551)	( 28.81)
Barang/Jasa yang Harus Diterima	22,436,691,867	19,995,697,553	2,440,994,314	12.21
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	( 22,241,989,715)	( 19,802,839,526)	( 2,439,150,189)	12.32
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>659,116,501,341</b>	<b>624,657,731,344</b>	<b>34,458,769,997</b>	<b>5.52</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	143,507,204,560,291	158,623,798,919,876	( 15,116,594,359,585)	( 9.53)
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	3,697,114,000,961	4,072,251,928,397	( 375,137,927,436)	( 9.21)
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>147,204,318,561,252</b>	<b>162,696,050,848,273</b>	<b>( 15,491,732,287,021)</b>	<b>( 9.52)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>147,863,435,062,593</b>	<b>163,320,708,579,617</b>	<b>( 15,457,273,517,024)</b>	<b>( 9.46)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>148,324,032,719,573</b>	<b>163,463,782,161,579</b>	<b>( 15,139,749,442,006)</b>	<b>( 9.26)</b>

JAKARTA, . MEI 2014  
 MENTERI PERHUBUNGAN

  
 E.E. MANGINDAAN

### III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### A. PENJELASAN UMUM

##### *Dasar Hukum*

#### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2013.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

## A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

*Rencana Strategis*

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2010–2014

#### I. VISI

Visi Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 adalah **“Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”** Pelayanan perhubungan yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan perhubungan yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

#### II. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi dengan mengacu kepada tiga pendekatan, yaitu: Pertama, pemulihan kondisi sarana dan prasarana perhubungan agar berfungsi seperti pada masa sebelum krisis ekonomi; Kedua, melakukan konsolidasi dengan reorientasi dan reposisi peran dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam kerangka *good governance*; Ketiga,

melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan. Oleh karena itu misi Kementerian Perhubungan sesuai dengan tiga pendekatan tersebut adalah:

**a. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa perhubungan:**

Sejak terjadi krisis ekonomi yang didahului dengan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, kinerja pelayanan jasa perhubungan semakin memburuk karena operator tidak mampu melakukan perawatan dan peremajaan armada, pemerintah hampir tidak memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat pengguna jasa tidak memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan pemulihan kinerja pelayanan jasa perhubungan menuju kepada kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana perhubungan.

**b. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan (*regulatory reform*) dan penegakan hukum secara konsisten:**

Sesuai dengan prinsip *good governance* dipandang perlu melakukan restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa perhubungan. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, mengarahkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan perbantuan. Reformasi di bidang regulasi (*regulatory reform*) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa perhubungan. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa perhubungan.

**c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan:**

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan perdesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

**d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan:**

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan, perbaikan pelayanan melalui penerapan teknologi transportasi sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa perhubungan senantiasa berpedoman kepada rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

### **III. TUJUAN**

Pembangunan Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2010-2014 bertujuan untuk mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

Dalam mewujudkan dukungan tersebut penyelenggaraan transportasi harus berjalan secara efektif dan efisien guna menunjang dan mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan maksimalisasi dayaguna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

## **IV. SASARAN DAN PRIORITAS**

### **a. SASARAN**

Sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan diarahkan kepada upaya penyelenggaraan transportasi guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta adil dan demokratis. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum transportasi difungsikan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di perdesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk memperlancar mobilitas orang dan distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai, diupayakan penyediaan aksesibilitas transportasi di wilayah konflik, wilayah perbatasan dan wilayah terisolasi untuk mendorong kelancaran mobilitas orang, distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung Indonesia yang adil dan demokratis, pembangunan transportasi diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transportasi antar wilayah akan membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah, sehingga mendorong terciptanya kesempatan melaksanakan pembangunan antar wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan transportasi. Dengan memperhatikan arah penyelenggaraan transportasi seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana perhubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan (*regulatory reform*)) dibidang perhubungan dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan pedesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai;
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### **b. PRIORITAS**

Pembangunan perhubungan tahun 2010-2014, dititikberatkan kepada pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan pembangunan angkutan jalan, angkutan perkotaan, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara dengan prioritas sebagai berikut:

1. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global;
2. Terwujudnya keselamatan transportasi sebagai implementasi dari program *Roadmap to Zero Accident*;
3. Mendukung program pengentasan kemiskinan melalui upaya penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;

4. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran: pengurangan *backlog* sarana dan prasarana perkeretaapian dan penambahan kapasitas terkait dengan peningkatan permintaan jasa transportasi;
5. Penyediaan dana pendamping pinjaman dan hibah luar negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pinjaman secara bilateral;
6. Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi;
7. Pembangunan kawasan perbatasan/pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI;
8. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya sehubungan dengan perubahan iklim terkait dengan isu pemanasan global (*global warming*).

### c. STRATEGI

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan perhubungan, yaitu:

#### 1. STRATEGI PEMULIHAN DAN PENATAAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Strategi ini diarahkan untuk melakukan pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan kembali ke posisi normal setelah terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan dilanjutkan dengan penataan Sistem Transportasi Nasional sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global. Pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan dibarengi dengan pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang

perhubungan (*regulatory reform*), peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Perhubungan, dengan pemihakan kepada peranserta swasta dalam pengoperasian dan pembangunan infrastruktur perhubungan, serta mereposisi peran pemerintah dari operator dan pemilik (*owner*) menjadi regulator dan fasilitator.

## 2. STRATEGI PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN

Strategi Pembangunan Perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat baik di seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara. Pembangunan perhubungan dilaksanakan dengan berpedoman kepada 7 (tujuh) pilar sebagai berikut:

- a) Pembangunan perhubungan dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (*cost recovery*), baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang;
- b) Pembangunan perhubungan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hasil pembangunan perhubungan memiliki dayaguna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat;
- c) Pembangunan perhubungan difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah;
- d) Pembangunan perhubungan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*);

- e) Pembangunan perhubungan dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (*market failure*);
- f) Pembangunan perhubungan dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistis dan rasional;
- g) Pembangunan perhubungan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan baik pada skala kecil, menengah, maupun skala besar.

## **KEBIJAKAN UMUM**

Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan transportasi, pelaksanaan fungsi penunjang (*servicing function*) dilakukan pada daerah yang telah berkembang dan maju. Kebijakan pelayanan pada daerah yang telah berkembang atau maju antara lain memberikan peluang bagi keterlibatan swasta untuk melaksanakan pelayanan dengan prinsip *least cost economy* terutama pada segmen usaha yang mampu mencapai *cost recovery*, sedangkan untuk segmen usaha yang tidak mampu mencapai *cost recovery*, pembangunan fasilitas pelayanan dilakukan oleh pemerintah. Untuk daerah terisolasi, terpencil, terbelakang dan kawasan perbatasan, pemerintah memberikan pelayanan transportasi melalui pelaksanaan fungsi pendorong (*promoting function*).
2. Pembangunan perhubungan mendukung kebijakan otonomi daerah melalui penyediaan jasa perhubungan yang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan daerah. Disamping itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk melakukan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian fasilitas perhubungan sesuai dengan kewenangannya.

3. Pembangunan perhubungan mendukung kelancaran mobilitas, distribusi dan pembangunan terutama pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sektor-sektor strategis lainnya, yang pada akhirnya turut menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan yang berkesinambungan.
4. Kebijakan pembangunan perhubungan berkelanjutan dilakukan dengan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi serta meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan sektor perhubungan dapat dilakukan secara efisien.
5. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilakukan dengan melibatkan partisipasi swasta dan melakukan restrukturisasi pada bidang usaha sesuai dengan tuntutan pasar domestik dan pasar global serta sesuai dengan semangat perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan reposisi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas SDM.
6. Kebijakan pembangunan perhubungan berkelanjutan dilakukan dengan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi serta meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan sektor perhubungan dapat dilakukan secara efisien.
7. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilakukan dengan melibatkan partisipasi swasta dan melakukan restrukturisasi pada bidang usaha sesuai dengan tuntutan pasar domestik dan pasar global serta sesuai dengan semangat perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan reposisi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas SDM.
8. Prinsip dasar kebijakan penetapan tarif jasa perhubungan terdiri dari 3 (tiga) aspek pertimbangan, yaitu:
  - a. Sisi Operator selaku Penyedia Jasa:

Pertimbangan finansial dengan pendekatan kepada faktor kelangsungan usaha dengan memperhitungkan biaya dari setiap jenis jasa perhubungan (*cost of service*) dan nilai jasa yang diproduksi dan penggunaan teknologi (*value of service*).

b. Sisi Masyarakat selaku Pengguna Jasa:

Pertimbangan sosial ekonomi dengan pendekatan kepada daya beli masyarakat dengan memperhitungkan kemampuan membayar (*ability to pay*) dan kemauan membayar (*willingness to pay*).

c. Sisi Pemerintah selaku Regulator:

Pertimbangan kebijakan nasional dengan lebih menekankan kepada stabilitas nasional, namun tetap dengan memperhitungkan tercapainya keadaan "*optimum allocation resources*" dengan memperhatikan kriteria efisiensi dan kriteria pemerataan dalam pembangunan serta menjaga tingkat pelayanan (*level of service*) dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan jasa perhubungan.

### **PRIORITAS PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2013**

Sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan diarahkan kepada upaya penyelenggaraan transportasi guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta adil dan demokratis. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan transportasi difungsikan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di pedesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk memperlancar mobilitas orang, distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai, diupayakan penyediaan aksesibilitas transportasi di wilayah konflik, wilayah perbatasan dan wilayah terisolasi untuk mendorong kelancaran mobilitas orang, distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung Indonesia yang adil dan demokratis, pembangunan transportasi pada tahun 2013 diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transportasi antar wilayah akan membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk

mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah, sehingga mendorong terciptanya kesempatan melaksanakan pembangunan antar wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan transportasi. Dengan memperhatikan arah penyelenggaraan transportasi seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2013 adalah mewujudkan sasaran yang telah diformulasikan dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan 2010-2014 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana perhubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
2. Terwujudnya keberlanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan/ *regulatory reform*) dibidang perhubungan dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan pedesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai;
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan tahun 2013, skenario pagu anggaran setiap program pembangunan Kementerian Perhubungan tahun 2013 disusun berdasarkan 8 (delapan) prioritas sebagai berikut :

1. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global;
2. Terwujudnya keselamatan transportasi sebagai implementasi dari program *Roadmap to Zero Accident*;

3. Mendukung program pengentasan kemiskinan melalui upaya penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;
4. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran : pengurangan *backlog* sarana dan prasarana perkeretaapian dan penambahan kapasitas terkait dengan peningkatan permintaan jasa transportasi;
5. Penyediaan dana pendamping pinjaman dan hibah luar negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pinjaman secara bilateral;
6. Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi;
7. Pembangunan kawasan perbatasan/pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI;
8. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya sehubungan dengan perubahan iklim terkait dengan isu pemanasan global (*global warming*).

### **Arah Kebijakan Pembangunan**

Arah kebijakan pembangunan sektor transportasi tahun 2013 adalah meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan jasa transportasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Upaya tersebut antara lain meliputi :

1. Meningkatkan keselamatan operasional baik sarana maupun prasarana transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi baik dikawasan perkotaan maupun daerah perbatasan, terisolir dan belum berkembang;
3. Penyediaan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas;
4. Melanjutkan reformasi peraturan perundangan agar dapat mendorong keikutsertaan investasi swasta dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait;

5. Melakukan restrukturisasi kelembagaan terhadap penyelenggara transportasi baik ditingkat pusat maupun daerah;
6. Melakukan optimalisasi penggunaan dana pemerintah baik untuk operasional, pemeliharaan, rehabilitasi maupun investasi melalui penyusunan prioritas program yang diwujudkan dalam suatu kegiatan.

Arah kebijakan masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut:

**a. Transportasi Darat**

Arah kebijakan transportasi darat meliputi: (1) Peningkatan kondisi pelayanan angkutan umum jalan raya; (2) Meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai pendukung moda transportasi lainnya; (3) Melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil; (4) Melanjutkan kegiatan operasional unit pelaksana teknis dan tugas serta fungsi pemerintah lainnya; (5) Meningkatkan keselamatan transportasi darat secara komprehensif dan terpadu; (6) Pengembangan transportasi darat berkelanjutan; (7) Pemaduan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota.

**b. Transportasi Kereta Api**

Arah kebijakan pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2013 meliputi: (1) Penyiapan dan penguatan regulasi berupa penyelesaian peraturan perundangan serta penyusunan peraturan/pedoman pendukung lainnya termasuk regulasi dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian multioperator; (2) Melanjutkan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan termasuk untuk mewujudkan eksistensi Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian; (3) Meningkatkan kapasitas lintas dan kualitas pelayanan serta reaktivasi koridor-koridor yang sudah tidak dioperasikan; (4) Meningkatkan keselamatan angkutan melalui pemulihan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian serta pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian; (5) Melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM operator perkeretaapian; (6) Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian melalui perwujudan keterpaduan antar moda dan pengembangan KA perkotaan; (7) Meningkatkan peran serta pemerintah

daerah dan swasta di bidang perkeretaapian; (8) Meningkatkan SDM perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian nasional.

**c. Transportasi Laut**

Arah kebijakan pembangunan transportasi laut tahun 2013 difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, pembangunan sistem yang memperlancar dan mempermudah pelayanan serta peningkatan SDM dan pengembangan institusi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1) Membangun dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang memiliki *waiting time* tinggi; (2) Membangun kapal-kapal perintis bagi daerah yang membutuhkan; (3) Membangun pelabuhan-pelabuhan kecil yang disinggahi kapal perintis; (4) Membangun dan meningkatkan kualitas terminal penumpang, terutama pada daerah tujuan wisata; (5) Membangun kapal patroli dan SBNP serta peralatan keselamatan lainnya; (6) Membangun sistem pelayanan perizinan yang memperlancar, mempermudah dan memberi kepastian waktu; (7) Membangun sistem pelayanan dan pendidikan terpadu bagi pelaut, bekerja sama dengan Badan Diklat Perhubungan; (8) Membangun sistem pengadaan barang/jasa yang transparan dan bersih; (9) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; (10) Membentuk organisasi baru sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008: Otoritas pelabuhan, Syahbandar, Unit Penyelenggara Pelabuhan dan *Sea and Coast Guard*; (11) Menerapkan sistem remunerasi baru; (12) Melimpahkan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan *feeder* kepada pemerintah daerah.

**d. Transportasi Udara**

Arah kebijakan pembangunan transportasi udara adalah: (1) Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO guna meningkatkan keselamatan penerbangan, baik selama penerbangan maupun di bandara wilayah Indonesia; (2) Mengembangkan dan meningkatkan prasarana transportasi udara di daerah rawan bencana alam dan daerah perbatasan serta daerah potensi ekonomi; (3) Peningkatan dan

pemulihan kembali fungsi sarana dan prasarana transportasi udara sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh ICAO; (4) Pengembangan sistem, regulasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; (5) Menciptakan perusahaan penerbangan nasional yang efisien, efektif, dan kompetitif dalam pasar internasional; (6) Menciptakan iklim usaha jasa angkutan udara dalam persaingan sehat dan kondusif sehingga mempunyai kelangsungan hidup jangka panjang.

**e. Penunjang Transportasi**

Pada tahun 2013 arah kebijakan penunjang transportasi di lingkungan Sekretariat Jenderal meliputi: (1) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan penyiapan tugas pokok dan fungsi; (2) Memberikan kesempatan yang luas kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di sektor transportasi; (3) Pengembangan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Perhubungan; (4) Reformasi dan restrukturisasi organisasi yang mampu mengantisipasi perkembangan sektor transportasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi; (5) Perencanaan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi; (6) Koordinasi penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan perundang-undangan dibidang transportasi; (7) Penyusunan peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang transportasi; (8) Pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan perumusan perjanjian; (9) Pemberian bantuan hukum; (10) Penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi; (11) Pengelolaan jaringan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi; (12) Penyiapan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta konsultasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri; (13) Mewujudkan Pelayanan Umum yang Optimal yang antara lain meliputi : Terwujudnya pelayanan kepemimpinan dan keprotokolan yang handal dan dinamis; Terwujudnya pelayanan dan tertib administrasi yang sesuai dengan sistem dan prosedur;

Terselenggaranya pelayanan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan (K3), sarana dan prasarana dengan baik; Terwujudnya pelayanan administrasi pembiayaan dan perjalanan dinas yang efektif dan efisien; Terselenggaranya peningkatan kesehatan pegawai yang memadai; (14) Mengembangkan kerja sama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan rencana dan sesuai peraturan berlaku; (15) Mengarahkan dan mendorong agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terjadi KKN; (16) Melaksanakan *Action Plan* (rencana tindak) Kementerian Perhubungan untuk mencapai opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (17) Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan *action plan*; (18) Melakukan klarifikasi terhadap hasil inventarisasi BMN oleh Tim Keppres 17; (19) Intensifikasi dan ekstensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Perhubungan; (20) Mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tingkat pelayanan kepada publik tinggi untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU); (21) Penatausahaan, pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan Kementerian Perhubungan; (22) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Anggaran yang tertib dan teratur termasuk evaluasi Pinjaman Hibah Luar Negeri; (23) Pengelola Anggaran yang berkualitas; (24) Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan BMN; (25) Melaksanakan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup sektor transportasi; (26) Perluasan jaringan informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memperluas difusi informasi kebijakan Kementerian Perhubungan melalui media radio, televisi dan media cetak dengan memanfaatkan teknologi internet akan pengembangan komunikasi interaktif lewat internet; (27) Pengembangan dan penyebaran informasi dan komunikasi secara terpadu melalui satu pintu yang mengintegrasikan masukan-masukan dari bagian Humas di setiap Direktorat Jenderal; (28) Pengembangan / peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) secara profesional dengan melaksanakan Diklat bidang infokom yang

profesional dan pemanfaatan program, diklat dalam dan luar negeri bidang informasi; (29) Peningkatan sarana dan prasarana operasional infokom, melalui pengadaan sarana dan prasarana infokom sesuai perkembangan teknologi informasi. Upaya peningkatan sarana dan prasarana tersebut dilakukan pula pengembangan sistem pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan; (30) Penyusunan standard kerja baku sebagai sarana pengendalian dan jaminan atas mutu penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informasi; (31) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan melalui peningkatan kerjasama dalam penyebaran informasi dan peningkatan sarana pelayanan informasi kepada masyarakat; (32) Peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga /unsur pers dan kelompok organisasi masyarakat. Upaya peningkatan ini dilakukan dengan melaksanakan jumpa pers dan liputan pers secara berkala serta peningkatan kualitas pemberitaan lewat media pers. Disamping itu juga perlu dilakukan pemanfaatan / pemberdayaan kelompok atau organisasi masyarakat dalam penyebaran informasi (kelompok informasi masyarakat, *media watch*); (33) Mengintegrasikan sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan; (34) Menstandarisasi data dan mekanisme pertukaran data di lingkungan Kementerian Perhubungan; (35) Menerapkan tata kelola administrasi pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) di lingkungan Kementerian Perhubungan; (36) Melakukan pengembangan aplikasi dengan menyesuaikan kebutuhan pengolahan dan penyajian data dan informasi.

*Pendekatan*

*Penyusunan Laporan*

*Keuangan*

### **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2013 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Perhubungan

seperti Eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Pada Tahun Anggaran 2013, Kementerian Perhubungan (UAPA) bertugas melakukan penggabungan dan pengkoordinasian laporan keuangan dari 8 (delapan) Unit Eselon I (UAPPA-E1), yaitu:

1. Sekretariat Jenderal sebanyak 18 (delapan belas) kantor/satuan kerja;
2. Inspektorat Jenderal sebanyak 1 (satu) kantor/satuan kerja;
3. Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 82 (delapan puluh dua) kantor/satuan kerja;
4. Ditjen Perhubungan Laut sebanyak 348 (tiga ratus empat puluh delapan) kantor/satuan kerja;
5. Ditjen Perhubungan Udara sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) kantor/satuan kerja;
6. Ditjen Perkeretaapian sebanyak 23 (dua puluh tiga) kantor/satuan kerja;
7. Badan Litbang Perhubungan sebanyak 5 (lima) kantor/satuan kerja;
8. Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebanyak 25 (dua puluh lima) kantor/satuan kerja.

Jumlah keseluruhan satuan kerja di lingkup Kementerian Perhubungan adalah 664 (enam ratus enam puluh empat) satker termasuk 7 (tujuh) satker BLU pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 664 (enam ratus enam puluh empat) satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.  
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	01	Setjen	18	-	-	-	-	-	-	-	18
2	02	Itjen	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	03	Ditjen Hubdat	82	-	-	-	-	-	-	-	82
4	04	Ditjen Hubla	25	-	323	-	-	-	-	-	348
5	05	Ditjen Hubud	10	-	152	-	-	-	-	-	162
6	08	Ditjen KA	23	-	-	-	-	-	-	-	23
7	11	Badan Litbang	5	-	-	-	-	-	-	-	5
8	12	Badan PSDM	25	-	-	-	-	-	-	-	25
Jumlah			189	-	475	-	-	-	-	-	664

Keterangan:

M : Menyampaikan

TM : Tidak Menyampaikan

SAI (Sistem Akuntansi Instansi) terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan*

**(1) Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

*Belanja*

**(2) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

*Aset*

**(3) Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2013 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang Jangka Panjang*

### **c. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

*Aset Lainnya*

**d. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

*Kewajiban*

**(4) Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

*Ekuitas Dana*

**(5) Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih*

**(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 4.  
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada PUPN/DJKN	100%

**(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap**

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Penggolongan Masa Manfaat**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp1.893.404.541.039,- atau mencapai 245,19 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp772.213.244.876,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Perhubungan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum.

Realisasi PNBP lebih tinggi dari Estimasinya disebabkan antara lain tingginya realisasi pendapatan dari pengelolaan BMN, realisasi pendapatan jasa, realisasi pendapatan pendidikan, realisasi pendapatan iuran dan denda, realisasi pendapatan lain-lain, realisasi pendapatan jasa layanan umum, realisasi pendapatan Hasil Kerjasama BLU, serta realisasi pendapatan BLU lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6.  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2013		
	Anggaran	Realisasi (Netto)	% Real Angg.
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	Rp 2.015.873.142	Rp 8.673.093.938	430,24
2. Pendapatan Jasa	Rp 653.164.536.734	Rp 1.167.449.460.953	178,74
3. Pendapatan Pendidikan	Rp 7.337.230.000	Rp 20.184.336.643	275,09
4. Pendapatan Iuran dan Denda	Rp -	Rp 53.335.792.477	-
5. Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp 375.265.115.600	-
6. Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp 109.695.605.000	Rp 252.458.240.774	230,14
7. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	Rp -	Rp 10.935.322.119	-
8. Pendapatan BLU Lainnya	Rp -	Rp 5.103.178.535	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 772.213.244.876</b>	<b>Rp 1.893.404.541.039</b>	<b>245,19</b>

Berdasarkan Tabel 7, Realisasi PNBP Lainnya TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 42,15 persen dibandingkan TA 2012 yang disebabkan oleh meningkatnya nilai beberapa jenis pendapatan yaitu pendapatan dari pengelolaan BMN, pendapatan jasa, pendapatan pendidikan, pendapatan iuran dan denda, pendapatan lain-lain, pendapatan jasa layanan umum, pendapatan Hasil Kerjasama BLU, serta pendapatan BLU lainnya.

Tabel 7.  
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan 2012

URAIAN	REALISASI T.A. 2013	REALISASI T.A. 2012	NAIK (TURUN)
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	Rp 8.673.093.938	Rp 7.549.061.024	14,89
2. Pendapatan Jasa	Rp 1.167.449.460.953	Rp 999.236.806.429	16,83
3. Pendapatan Bunga	Rp -	Rp 6.547.146	(100,00)
4. Pendapatan Pendidikan	Rp 20.184.336.643	Rp 11.647.506.939	73,29
5. Pendapatan Iuran dan Denda	Rp 53.335.792.477	Rp 12.696.093.988	320,10
6. Pendapatan Lain-Lain	Rp 375.265.115.600	Rp 54.421.269.440	589,56
7. Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp 252.458.240.774	Rp 238.197.475.540	5,99
8. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	Rp 10.935.322.119	Rp 3.248.797.304	236,60
9. Pendapatan BLU Lainnya	Rp 5.103.178.535	Rp 4.976.057.223	2,55
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp 1.893.404.541.039</b>	<b>Rp 1.331.979.615.033</b>	<b>42,15</b>

**B.2. Belanja Negara**

Realisasi belanja Kementerian Perhubungan pada TA 2013 adalah sebesar Rp31.718.259.929.128,- atau sebesar 88,29 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran Kementerian Perhubungan pada TA 2013 sebesar Rp35.926.285.034.100,- Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 menurut program tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8.

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2013**

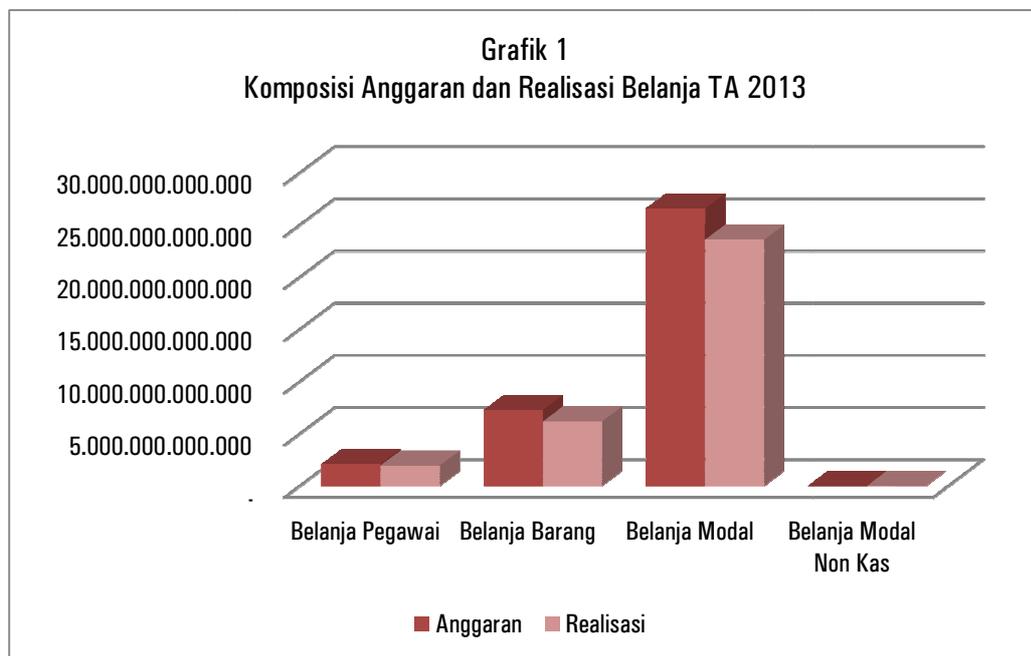
Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi T.A. 2013 (Netto)	% Realisasi
01.01.101	Prog Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenhub	Rp 1.019.145.232.000	Rp 948.593.821.331	93,08
01.01.103	Prog Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenhub	Rp 48.832.875.000	Rp 36.750.165.552	75,26
01.01.106	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Darat	Rp 165.511.459.000	Rp 110.410.797.003	66,71
01.01.107	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp.Perkeretaapian	Rp 112.597.980.000	Rp 88.292.880.989	78,41
01.01.108	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp.Laut	Rp 2.359.806.293.100	Rp 2.056.557.900.377	87,15
01.03.305	Prog. Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 298.509.410.000	Rp 253.766.130.280	85,01
04.08.803	Prog Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenhub	Rp 36.918.828.000	Rp 24.763.615.470	67,08
04.08.805	Prog. Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 900.520.750.000	Rp 781.567.276.567	86,79
04.08.806	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Darat	Rp 2.847.653.766.000	Rp 2.566.263.938.760	90,12
04.08.807	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	Rp 9.259.987.759.000	Rp 8.241.807.788.241	89,00
04.08.808	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp.Laut	Rp 9.262.438.701.000	Rp 7.850.525.765.318	84,76
04.08.809	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara	Rp 7.568.474.138.000	Rp 6.996.350.020.107	92,44
04.10.004	Prog Penelitian dan Pengembangan Kemenhub	Rp 221.298.005.000	Rp 187.328.077.130	84,65
10.06.605	Prog. Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 1.824.589.838.000	Rp 1.563.818.148.944	85,71
01.01.108	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut (Non Kas)	Rp -	Rp 12.000.000	0,00
04.08.808	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut (Non Kas)	Rp -	Rp 35.000.000	0,00
04.08.809	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara (Non Kas)	Rp -	Rp 11.416.603.059	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 35.926.285.034.100</b>	<b>Rp 31.718.259.929.128</b>	<b>88,29</b>

Berdasarkan Tabel 9, Realisasi Belanja lebih rendah dari anggarannya yang disebabkan antara lain tingginya dana bertanda bintang, pelaksanaan pengadaan barang/jasa terlambat, adanya permasalahan lahan, dan adanya kebijakan pemotongan anggaran serta proses revisi anggaran.

Tabel 9.  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 2.080.598.769.100	Rp 1.951.179.343.385	93,78
Belanja Barang	Rp 7.267.788.878.000	Rp 6.193.327.286.800	85,22
Belanja Modal	Rp 26.577.897.387.000	Rp 23.582.575.382.975	88,73
Belanja Modal Non Kas	Rp -	Rp 11.463.603.059	0
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>Rp 35.926.285.034.100</b>	<b>Rp 31.738.545.616.219</b>	<b>88,34</b>
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp (20.285.687.091)	0
<b>Belanja Netto</b>	<b>Rp 35.926.285.034.100</b>	<b>Rp 31.718.259.929.128</b>	<b>88,29</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik 1.



Dibandingkan dengan TA 2012, realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 5,41 persen antara lain kenaikan realisasi pada belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10.  
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2013	REALISASI T.A. 2012	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp 1.950.792.958.299	Rp 1.441.874.025.790	35,30
Belanja Barang	Rp 6.183.732.107.026	Rp 5.365.872.795.980	15,24
Belanja Modal	Rp 23.572.271.260.744	Rp 23.198.127.579.414	1,61
Bantuan Modal Non Kas	Rp 11.463.603.059	Rp 77.740.606.750	(85,25)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 31.718.259.929.128</b>	<b>Rp 30.083.615.007.934</b>	<b>5,43</b>

*Belanja Pegawai*  
Rp1,95 Triliun

### **B.2.1 Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Realisasi belanja pegawai Kementerian Perhubungan TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp1.950.792.958.299,- dan Rp1.441.874.025.790,-. Terjadi kenaikan sebesar 35,30 persen. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan meningkatnya belanja gaji dan tunjangan PNS, belanja gaji dan tunjangan pejabat negara, serta belanja tunjangan khusus dan belanja transito. Rincian belanja pegawai disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11.  
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2013	REALISASI T.A. 2012	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 1.478.517.830.155	Rp 1.375.383.674.158	7,50
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	Rp 364.992.590	Rp -	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	Rp -	Rp -	-
Belanja Honorarium	Rp 2.719.805.000	Rp 4.691.250.000	(42,02)
Belanja Lembur	Rp 36.510.369.500	Rp 44.723.670.100	(18,36)
Belanja Vakasi	Rp 10.600.300.500	Rp 17.493.279.500	(39,40)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Transito	Rp 422.466.045.640	Rp -	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 1.951.179.343.385</b>	<b>Rp 1.442.291.873.758</b>	<b>35,28</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp (386.385.086)	Rp (417.847.968)	(7,53)
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>Rp 1.950.792.958.299</b>	<b>Rp 1.441.874.025.790</b>	<b>35,30</b>

*Belanja Barang*  
Rp6,18 Triliun

### **B.2.2 Belanja Barang**

Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Realisasi Belanja Barang Kementerian Perhubungan TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp6.183.732.107.026,- dan Rp5.365.872.795.980,-. Terjadi kenaikan realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 15,24 persen. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan adanya kenaikan belanja barang

operasional, non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri, belanja barang BLU, serta belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebagaimana disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12.  
Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2013	REALISASI T.A. 2012	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	Rp 902.724.347.874	Rp 718.195.719.980	25,69
Belanja Barang Non Operasional	Rp 1.552.520.545.158	Rp 1.230.561.436.815	26,16
Belanja Jasa	Rp 344.055.365.854	Rp 243.933.097.631	41,04
Belanja Pemeliharaan	Rp 1.404.307.483.436	Rp 1.134.890.366.627	23,74
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 598.424.876.537	Rp 531.230.898.263	12,65
Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp 50.548.780.374	Rp 37.674.276.486	34,17
Belanja Barang BLU	Rp 193.767.875.394	Rp 179.929.412.214	7,69
Belanja Barang utk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	Rp 1.137.253.469.173	Rp 1.294.946.081.868	(12,18)
Belanja Barang Lainnya utk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	Rp 9.724.543.000	Rp -	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 6.193.327.286.800</b>	<b>Rp 5.371.361.289.884</b>	<b>15,30</b>
Pengembalian Belanja	Rp (9.595.179.774)	Rp (5.488.493.904)	74,82
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>Rp 6.183.732.107.026</b>	<b>Rp 5.365.872.795.980</b>	<b>15,24</b>

Di dalam realisasi Belanja Barang tahun 2013 sebesar Rp6.183.732.107.026,00 diantaranya terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp1.652.488.929,00 dari 100 paket pekerjaan pada 10 satker. Atas nilai kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan koreksi pada nilai aset yang dihasilkan dan piutang bukan pajak, antara lain sebagai berikut:

NAMA SATKER	NAMA PAKET	PEMBAYARAN (% KONTRAK)	NILAI KELEBIHAN (Rp)	KET
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut				
Peningkatan Fungsi Pelabuhan dan Pengerukan	42 paket pekerjaan jasa konsultansi	100,00	498.162.500,00	
Badan Penelitian dan Pengembangan				
Puslitbang Laut	15 paket pekerjaan jasa konsultansi	100,00	175.575.000,00	
Puslitbang Manajemen Transportasi Multimoda	Enam paket pekerjaan jasa konsultansi	100,00	225.450.000,00	
	18 paket pekerjaan jasa konsultansi	100,00	293.400.000,00	
Sekretariat Balitbang	Sembilan paket pekerjaan jasa konsultansi	100,00	191.060.000,00	

Berdasarkan hasil rekon SAI dan SAU, terdapat koreksi belanja pada Laporan Keuangan Tahun 2013 (*Audited*) yaitu berupa :

- Pada Ditjen Perhubungan Laut terdapat pengembalian belanja jasa konsultan yang belum diinput sebesar Rp17.760.000,- dengan nomor SSBP 02 dan NTPN 0104130209061501.

- Pada Badan Litbang Perhubungan terdapat belanja-belanja dari SSBP yang terlambat disetor dengan total senilai Rp42.740.000,- sehingga diakui sebagai pendapatan atas pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu per tanggal 2 Januari 2014.
- Pada Sekretariat Jenderal terdapat pengembalian belanja perjalanan lainnya senilai Rp6.987.800,- dan pengembalian belanja perjalanan biasa senilai Rp9.681.000,- yang belum diinput dalam aplikasi SAKPA 2013 (berdasarkan hasil rekonsiliasi SAI dan SAU per 31 Desember 2013). Atas jurnal koreksi ini hanya mengakibatkan perubahan nilai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan tidak mempengaruhi neraca.

*Belanja Modal*  
*Rp23,57 Triliun*

### ***B.2.3 Belanja Modal***

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Realisasi Belanja Modal Kementerian Perhubungan TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp23.583.734.863.803,- dan Rp23.275.868.186.164,-. Kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar 1,32 persen antara lain disebabkan kenaikan belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Realisasi Belanja Modal pada Kementerian Perhubungan TA. 2013 senilai Rp23.583.734.863.803,- terdiri dari Belanja Modal dari Transaksi Kas senilai Rp23.572.271.260.744,- dan Belanja Modal dari Transaksi Non Kas senilai Rp11.463.603.059,-.

Belanja Modal dari Transaksi Non Kas Kementerian Perhubungan senilai Rp 11.463.603.059,- merupakan hibah langsung berupa barang/jasa yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan dicatat berdasarkan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung, Barang/Jasa, dan Surat Berharga (MPHL-BJS) yang diterbitkan KPPN Jakarta VI. Transaksi ini terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara yaitu pada Direktorat Keamanan Penerbangan dan Ditjen Perhubungan Laut yaitu pada UPP Sei Danau/Satui dan UPP Kintap.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13.  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2013	REALISASI T.A. 2012	Naik (Turun) %
<b>I. TRANSAKSI KAS</b>			
Belanja Modal Tanah	Rp 756.338.362.481	Rp 956.514.731.953	(20,93)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 4.235.486.090.258	Rp 3.904.442.943.612	8,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 1.978.737.882.201	Rp 1.671.950.550.329	18,35
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 15.627.283.677.623	Rp 15.542.922.017.107	0,54
Belanja Modal Lainnya	Rp 967.135.133.878	Rp 1.086.707.765.673	(11,00)
Belanja Modal BLU	Rp 17.594.236.534	Rp 36.984.081.450	(52,43)
<b>Jumlah Belanja Modal Transaksi Kas Bruto</b>	<b>Rp 23.582.575.382.975</b>	<b>Rp 23.199.522.090.124</b>	<b>1,65</b>
Pengembalian Belanja Modal	Rp (10.304.122.231)	Rp (1.394.510.710)	638,91
<b>Jumlah Belanja Modal Transaksi Kas Netto</b>	<b>Rp 23.572.271.260.744</b>	<b>Rp 23.198.127.579.414</b>	<b>1,61</b>
<b>II. TRANSAKSI NON KAS</b>			
Belanja Modal Non Kas	Rp 11.463.603.059	Rp 77.740.606.750	(85,25)
<b>Jumlah Belanja Modal Transaksi Non Kas Bruto</b>	<b>Rp 11.463.603.059</b>	<b>Rp 77.740.606.750</b>	<b>(85,25)</b>
Pengembalian Belanja Modal	Rp -	Rp -	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal Transaksi Non Kas Netto</b>	<b>Rp 11.463.603.059</b>	<b>Rp 77.740.606.750</b>	<b>(85,25)</b>
<b>JUMLAH RAYA (B. Modal Transaksi Kas Netto + B. Modal Transaksi Non Kas Netto)</b>	<b>Rp 23.583.734.863.803</b>	<b>Rp 23.275.868.186.164</b>	<b>1,32</b>

Di dalam realisasi Belanja Modal tahun 2013 sebesar Rp23.583.734.863.803,00 diantaranya terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp24.335.699.338,50, pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp20.695.359.230,00, dan kesalahan penganggaran sebesar Rp5.372.743.165,00, yaitu:

- Kelebihan pembayaran sebesar Rp24.335.699.338,50 dari 74 paket pekerjaan pada 19 Satker. Atas nilai kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan koreksi pada nilai aset yang dihasilkan dan piutang bukan pajak, antara lain sebagai berikut:

NAMA SATKER	NAMA PAKET	PEMBAYARAN (% KONTRAK)	NILAI KELEBIHAN (Rp)	KET
Ditjen Perhubungan Darat				
PTSDP	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Merak VI Tahap II	86,45	967.030.119,81	
Ditjen Perhubungan Laut				
Setditjen Perhubungan Laut	18 paket pekerjaan jasa konsultansi	100,00	380.420.000,00	
KSOP Kelas I Panjang	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pulau Tabu	100,00	377.856.338,00	
Disnav Kelas I Palembang	Pembangunan Trestle	100,00	672.750.019,00	

NAMA SATKER	NAMA PAKET	PEMBAYARAN (% KONTRAK)	NILAI KELEBIHAN (Rp)	KET
Ditjen Perhubungan Udara				
Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Existing	100,00	269.800.275,02	
Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu	Pembuatan Service Road di Bandara Pagar Alam	100,00	344.985.000,00	
	Pengembangan Sisi Udara Bandara Muara Bungo (Reguler)	100,00	4.793.996.990,47	
	Penimbunan dan Pematatan Tanah Untuk RESA di Bandar Udara Pagar Alam	100,00	9.676.312.754,30	
Bandara Dewadaru	Perpanjangan Landas Pacu	100,00	898.540.899,00	
	Pembuatan RESA	100,00	665.546.122,00	
BPSDM				
Politeknik Keselamatan Transportasi Darat Tegal	Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase	100,00	777.247.000,00	

- b. Pekerjaan belum selesai senilai Rp20.695.359.230,00 dari tujuh paket pekerjaan pada tiga satker. Atas hal tersebut, telah dilakukan koreksi pada nilai aset yang dihasilkan dan uang muka belanja modal (*prepayment*) dan sisa pekerjaan masih dalam proses penyelesaian, antara lain sebagai berikut:

NAMA SATKER	NAMA PAKET	PEMBAYARAN (% KONTRAK)	NILAI SISA PEKERJAAN (Rp)	KET
Ditjen Perhubungan Laut				
Peningkatan Fungsi KPLP	Pembangunan dua unit kapal patroli Kelas IV – Paket A	100,00	1.983.948.175,00	
	Pembangunan dua unit kapal patroli Kelas IV – Paket B	100,00	3.852.538.145,00	
Ditjen Perhubungan Udara				
Navigasi Penerbangan	Pengadaan dan pemasangan MSSR Mode S untuk Mutiara Palu	100,00	2.371.929.500,00	
	Pengadaan dan pemasangan MSSR Mode S untuk Pangkalanbun	100,00	2.825.080.000,00	
	Pengadaan dan pemasangan MSSR Mode S untuk Kupang dan Biak (Optimalisasi)	100,00	2.747.300.000,00	
	Pengadaan Enhanced JAATS Engineering System dan Test Bed Serta Flight Commissioning Radar	100,00	4.200.000.000,00	
Ditjen Perkeretaapian				
Pemb. Jalur Ganda Tanah Abang-Serpong-Maja-Merak	Pembangunan Gardu Traksi di Tiga Raksa	100,00	4.238.359.700,00	

- c. Kesalahan penganggaran Rp5.372.743.165,00 dari tiga satker pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian direalisasikan untuk biaya pemeliharaan, biaya perawatan, dan pembelian barang habis pakai yang tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset atau tidak dapat dikapitalisasi.

Pada Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2013 (*Audited*) dibandingkan dengan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2013 (*Unaudited*) terdapat perubahan realisasi Belanja Modal, yaitu :

- Pada Ditjen Perhubungan Laut terdapat koreksi pencatatan belanja hibah langsung berupa :
  - a. Tanah dari Agus Norhikmah dengan nomor MPHL-BJS 00011/413410/2013 tanggal 6 Maret 2013 terdapat pada UPP Sei Danau/Satui, dan
  - b. Tanah dari Kepala Desa Kintap dengan nomor MPHL-BJS 00089/559292/HIBAH/UPP.SD-13 tanggal 4 November 2013 terdapat pada UPP Kintap.

Kedua aset berupa tanah hibah tersebut telah dicatat pada Neraca Laporan Keuangan Kemenhub TA. 2013 (*Unaudited*).

- Pada Ditjen Perkeretaapian terdapat penambahan realisasi atas belanja modal lainnya senilai Rp6.125.056.657,- untuk mencatat terbitnya 4 (empat) buah SP3 yaitu masing-masing Nomor : 257369Y/140/100, Nomor : 257294Y/140/100, Nomor : 257441Y/140/100 dan Nomor : 257433Y/140/100 untuk pekerjaan Engineering Service Railway DT Kutoarjo-Kroya (IP-540).

## C. CATATAN PENTING

### 1. Pinjaman dan Hibah

Pinjaman dan hibah pada Kementerian Perhubungan terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Laut, serta BPSDM dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Ditjen Perhubungan Udara

Realisasi Pinjaman TA 2013 adalah sebesar Rp 28.926.555.625,- .atau sebesar 51.54 % dari anggaran senilai Rp 56.121.501.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

NO	REGISTER NO	NAMA DONOR	No SP2D	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	40101901	ING BANK NV	248499Y	Rp -	Rp 697.713.763,00	Rp (697.713.763,00)
2		ING BANK NV	252692Y	Rp 28.926.556.000,00	Rp 1.309.469.956,00	Rp 27.617.086.044,00
3		ING BANK NV	255718Y	Rp 27.194.945.000,00	Rp 26.919.371.906,00	Rp 275.573.094,00
TOTAL				Rp 56.121.501.000,00	Rp 28.926.555.625,00	Rp 27.194.945.375,00

Realisasi Pinjaman tersebut merupakan bantuan yang diperoleh Direktorat Keamanan Penerbangan dari Pemerintah Belanda (*ING/Procurement of ARFF Equipment* Belanda) dengan Register 40101901 berupa pengadaan dan pengiriman 30 (tiga puluh) unit PKP-PK di 26 (dua puluh enam) Bandara.

Pada Ditjen Perhubungan Udara terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk pencatatan peralatan dan mesin dari hibah sebesar Rp 11.416.603.059,- ini merupakan realisasi hibah langsung dari Pemerintah Belanda (*ORET/Procurement of ARFF Equipment* Belanda (*Grant*)) dengan register nomor 71118801 yang dicatat dalam Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) tanggal memo 18 November 2013 nomor 0188/LS/DKP/09/2013 dan tanggal persetujuan 25 November 2013 nomor 923904F/133/701.

Berikut adalah daftar Bandara penerima 30 (tiga puluh) unit kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang berasal dari pinjaman dan hibah ING BANK/ORET sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Amandemen Nomor 1 (satu), Kontrak Nomor :1033/KTR.003.02.3/DKP.2009 tanggal 16 Desember 2009 dan Amandemen Nomor 2 (dua) tanggal 19 September 2011 :

NO	LOKASI	TIPE
1	Bandara Sibolga	FT TYPE II
2	Bandara Pangkalan Bun	FT TYPE II
3	Bandara Bengkulu	FT TYPE II DAN RIVCA TYPE III
4	Bandara Waingapu	FT TYPE II
5	Bandara Ende	FT TYPE II
6	Bandara Kendari	FT TYPE II
7	Bandara Gorontalo	FT TYPE II
8	Bandara Labuan Bajo	FT TYPE II
9	Bandara Nabire	FT TYPE II
10	Bandara Wamena	FT TYPE II
11	Bandara Manokwari	FT TYPE II DAN RIVCA TYPE III
12	Bandara Lampung	FT TYPE II DAN RIVCA TYPE III
13	Bandara Sorong	FT TYPE II
14	Bandara Merauke	FT TYPE II
15	Bandara Alor	RIVCA TYPE III
16	Bandara Singkep	RIVCA TYPE III
17	Bandara Cilacap	RIVCA TYPE III

NO	LOKASI	TIPE
18	Bandara Buli – Maba	RIVCA TYPE III
19	Bandara Sintang	RIVCA TYPE III
20	Bandara Ruteng	RIVCA TYPE III
21	Bandara Kolaka	RIVCA TYPE III
22	Bandara Sangir Talaud	RIVCA TYPE III
23	Bandara Poso	RIVCA TYPE III
24	Bandara Maumere	RIVCA TYPE III
25	Bandara Atambua	RIVCA TYPE III
26	Bandara Tambolaka – Waikabubak	FT TYPE II DAN RIVCA TYPE III

b. Ditjen Perhubungan Laut

NO	NAMA SATKER	NEGARA	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Multi Negara ( <i>Aids to Navigation Fund</i> )	Bantuan pemeliharaan dan penggantian peralatan kenavigasian Indonesia di Selat Malaka ( <i>Maintenance &amp; Replacement of Aids to Navigation in the Strait of Malacca</i> )	Register 70878801. Sudah disahkan pendapatan sebesar Rp14.028.658.958,- (USD 1.576.145,12)
2.	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Jepang	<i>Vessel Traffic System (VTS) Selat Malaka Phase 2</i>	Nomor register 70991901 dalam proses lelang pada kegiatan Selat Malaka
3.	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Norad	<i>Consultancy Services for VTS</i>	Nomor Register 71604001. Yang sudah disahkan sebesar Rp845.820.000,-
4.	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Multi Negara ( <i>World Bank</i> )	<i>Marine Electronic Highway (MEH)</i>	Register 70659501

Dalam rangka kerjasama 3 (tiga) negara pantai (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) maka dengan dukungan *International Maritime Organization* (IMO) dalam wadah *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG). Telah dibentuk forum kerjasama *Cooperative Mechanism* yang didasarkan pada kesepakatan *Ministerial Meeting* di Batam tahun 2005 untuk mengaplikasikan *article 43 UNCLOS 1982* yang mendorong peran serta *User States* dan *Stakeholders* dalam peningkatan keselamatan dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura. *Cooperative Mechanism* direncanakan selama 10 tahun dan dana hibah untuk Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun (tahun 2009 s.d. 2018) direncanakan sebesar US\$32.038.213,00.

c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan

NO	NAMA SATKER/UPT	NAMA ASET HIBAH LANGSUNG	NILAI (Rp)	ASAL HIBAH	BAST		KETERANGAN
					SUDAH	BELUM	
1	STPI Curug	Gedung	4.966.975.000	PT. Garuda Indonesia	v		Nomor Register : 73253301 Kementerian Keuangan RI
		Kendaraan	1.099.500.000	PT. Garuda Indonesia	v		
2	BPPTD Tegal	Tanah (133.500 m <sup>2</sup> )	2.670.000.000	Pemerintah Kota Tegal	v		Sudah Terbit sertifikat Hak Pakai : 11.06.03.04.4.00038 s/d 11.06.03.04.4.00050 semuanya 13 bidang Sudah registrasi hibah ke DJPU dengan nomor 73985701
3	PPSDM PHB DARAT	Tanah Madiun (181.385 m <sup>2</sup> )	9.069.250.000	Pemerintah Kota Madiun	v		Sudah registrasi hibah ke DJPU dengan nomor 73994001
		Tanah Pontianak (175.000 m <sup>2</sup> )	1.499.250.000	Pemerintah Kabupaten Pontianak	v		Sudah Terbit sertifikat Hak Pakai : 14.02.03.04.1.01604 14.02.03.04.1.01688 14.02.03.04.1.01689 sudah registrasi hibah ke DJPU dengan nomor 73995701
4	PPSDM PHB LAUT	Tanah Aceh (272.139 m <sup>2</sup> )	26.995.305.915	Pemerintah Daerah Aceh	v		Sudah Terbit sertifikat Hak Pakai : 01.03.09.11.4.00002 01.03.09.11.4.00003 01.03.09.11.4.00004 sudah registrasi hibah ke DJPU dengan nomor 73916401
5	PPSDM PERHUB. UDARA	Kendaraan berupa 1 (satu) unit microbus (penumpang 15 s.d.29 orang) merk HINO	493.000.000	Angkasa Pura II	v		belum diregistrasikan karena belum ada BPKB
6	ATKP SURABAYA	1. Kendaraan berupa 1 (satu) unit minibus (penumpang 14 orang ke bawah) merk HYUNDAI H-1	430.500.000	PELITA AIR SERVICE	v		belum diregistrasikan karena belum ada BPKB
		2. Kendaraan berupa 2 (dua) unit minibus (penumpang 14 orang ke bawah) merk TOYOTA KIJANG INNOVA	613.780.000	PELITA AIR SERVICE			belum diregistrasikan karena belum ada BPKB
7	BP2IP SORONG	Tanah Sorong +/- 20 Ha	-	Pemerintah Kota Sorong	v		Dalam proses pensertifikatan

d. Badan Penelitian dan Pengembangan

Hibah jasa pada Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp2.250.000.000,- (USD 500.0000) untuk 2 (dua) tahun dari Tahun 2012-2013. Merupakan hibah langsung yang telah diregister dan penyesuaian DIPA dengan nomor register 72534001 Nomor PHLN TA-8045-INO tanggal 8 Mei 2012. Hibah didonorkan pada Sekretariat Badan Litbang untuk program studi konektivitas domestik melalui ADBG.

2. **Kendala/Hambatan Penyerapan Anggaran TA. 2013**

Kendala-kendala dalam penyerapan anggaran pada TA. 2013 antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut :

a. Tingginya dana bertanda bintang

- Pada awal tahun dari alokasi pagu sebesar 36,68 Trilyun Rupiah terblokir sebesar 30,67 Trilyun Rupiah (83,61%), telah diproses pencairannya bertahap dari bulan Januari s/d 26 Juli 2013, dan posisi saat ini sisa blokir sebesar 323,41 Milyar Rupiah.

b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa terlambat, antara lain disebabkan :

- Menunggu terbitnya revisi DIPA optimalisasi non pendidikan;
- Kegiatan fisik baru dapat dilelangkan, setelah pekerjaan perencanaan/DED selesai;
- Kegiatan pengadaan peralatan menunggu pekerjaan fisik selesai;
- Adanya reviu desain (penyesuaian desain dengan kondisi lapangan);
- Kekurangan SDM bersertifikat/SDM yang bersedia menjadi panitia.

c. Adanya permasalahan lahan

- Pembebasan lahan untuk kegiatan pembangunan jalan kereta api Lintas Utara Jawa.

d. Adanya kebijakan pemotongan anggaran dan proses revisi anggaran

- Pada periode Januari s/d Juli 2013 tersebut juga terjadi proses revisi anggaran mulai dari pengalokasian dana optimalisasi non pendidikan untuk infrastruktur, proses kebijakan penghematan/pemotongan anggaran, *Self Blocking, Reward* Penghargaan, sampai dengan proses ABT yang meliputi dana infrastruktur dan angkutan motor lebaran (persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk masing-masing Eselon I terkait revisi ini disetujui periode 2 s/d 23 Agustus 2013).

### 3. Catatan Penting Lainnya

- a. Terhadap pagu minus yang terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan yang telah direvisi seluruhnya adalah Ditjen Perhubungan Udara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan. Sedangkan pada Ditjen Perhubungan Laut, pagu minus masih terdapat pada KSOP Kuala Tanjung dan UPP Belang.
- b. Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara SAI dengan SAU dan adanya penerbitan SP3 serta hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA. 2013 (*Unaudited*) telah dilakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan TA. 2013 (*Audited*).

## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar Rp1,119  
Triliun

### C.1. ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp1.119.714.158.321,- dan Rp767.731.313.306,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14.  
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

No.	Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 1.167.058.545	Rp 810.754.169
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 10.121.153.259	Rp 19.029.872.722
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp 424.615.684.680	Rp 3.329.183.847
4	Kas pada BLU	Rp 193.152.487.378	Rp 161.040.871.577
5	Investasi Jangka Pendek BLU	Rp 25.023.013.699	Rp -
6	Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	Rp 219.863.167	Rp 160.596.995
7	Uang Muka Belanja (prepayment)	Rp 22.216.828.700	Rp 19.835.100.558
8	Piutang Bukan Pajak	Rp 167.358.155.328	Rp 146.322.771.124
9	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp (19.276.250.570)	Rp (28.407.901.233)
10	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	Rp 25.703.566.497	Rp 287.903.313.703
11	TP/TGR	Rp (128.517.833)	Rp (215.000)
12	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	Rp 2.656.899.000	Rp 1.617.931.020
13	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	Rp (53.146.683)	Rp (47.951.843)
14	Piutang dari Kegiatan Non	Rp -	Rp 42.357.400
15	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Piutang dari Kegiatan	Rp -	Rp (211.787)
16	Persediaan	Rp 264.005.547.156	Rp 154.789.258.848
17	Persediaan BLU	Rp 2.931.815.998	Rp 1.305.581.206
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.119.714.158.321</b>	<b>Rp 767.731.313.306</b>

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp1,16 Miliar

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.167.058.545,- dan sebesar Rp810.754.169,-.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 15.  
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I

No	Uraian Eselon I	31-Des-13	31-Des-12	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretaris Jenderal	Rp 247.433.636	Rp 188.763.405	Rp 58.670.231
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
3	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 114.257.553	Rp 43.113.676	Rp 71.143.877
4	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 382.411.419	Rp 144.993.773	Rp 237.417.646
5	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 422.541.649	Rp 414.842.294	Rp 7.699.355
6	Ditjen Perkeretaapian	Rp -	Rp 19.023.521	Rp (19.023.521)
7	Badan Litbang Perhubungan	Rp 325.700	Rp 17.500	Rp 308.200
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 88.588	Rp -	Rp 88.588
	<b>Total</b>	<b>Rp 1.167.058.545</b>	<b>Rp 810.754.169</b>	<b>Rp 356.304.376</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara.

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp10,12 Miliar*

### C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp10.121.153.259,- dan sebesar Rp19.029.872.722,-.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan lingkup per Eselon I tersaji pada Tabel 16.

Tabel 16.  
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I

No	Uraian Eselon I	31-Des-13	31-Des-12	Kenaikan/Penurunan
1	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 2.218.679	Rp 15.347.440	Rp (13.128.761)
2	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 5.310.360.193	Rp 12.335.524.147	Rp (7.025.163.954)
3	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 882.795.585	Rp 3.475.278.493	Rp (2.592.482.908)
4	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 3.925.778.802	Rp 3.203.722.642	Rp 722.056.160
	<b>Total</b>	<b>Rp 10.121.153.259</b>	<b>Rp 19.029.872.722</b>	<b>Rp (8.908.719.463)</b>

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp6.518.087.226, dan sebesar Rp3.919.292.792 yang belum/digunakan langsung yang terdapat pada BPSDM Perhubungan.

Tabel 17.

## Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
1	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 2.218.679	Rp 2.218.679	
2	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 5.626.586.952	Rp 5.626.586.952	Rp -
3	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 882.795.585	Rp 882.795.585	Rp -
4	BPSDM Perhubungan	Rp 3.925.778.802	Rp 6.486.010	Rp 3.919.292.792
Total		Rp 10.437.380.018	Rp 6.518.087.226	Rp 3.919.292.792

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp3.925.778.802,- tersaji pada Tabel 18.

Tabel 18.

## Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada BPSDMP

Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012
ATKP Makassar	Rp 1.754.133.882	Rp 1.117.852.947
ATKP Medan	Rp 2.129.859.910	Rp 1.910.677.530
BP2TD Palembang	Rp 540.000	Rp -
BP2IP Barombong	Rp 5.946.010	Rp -
STTD Bekasi	Rp 35.299.000	Rp 158.582.000
STPI Curug	Rp -	Rp 16.610.165
Saldo	Rp 3.925.778.802	Rp 3.203.722.642

Saldo Kas tersebut terdiri dari :

1. Saldo Kas Sesuai Mekanisme APBN sebesar Rp6.486.010,- yaitu :
  - a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan BP2TD Palembang sebesar Rp540.000,- telah disetorkan ke kas Negara pada tanggal 29 Januari 2014 dengan nomor NTPN : 0603080704131206.
  - b. BP2IP Barombong sebesar Rp5.946.010,- telah disetorkan pada tanggal 29 Januari 2014 dengan nomor NTPN : 0915060412120311.
2. Saldo Kas Di Luar Mekanisme APBN sebesar Rp3.919.292.792,- yaitu :
  - ATKP Makassar Rp 1.754.133.882,-
  - STTD Bekasi Rp 35.299.000,-
  - ATKP Medan Rp 2.129.859.910,-

Rincian Saldo :

- a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan STTD Bekasi sebesar Rp35.299.000,- merupakan uang titipan taruna yang dikelola oleh Komite Orang Tua Taruna untuk memenuhi kebutuhan Taruna yang tidak didanai oleh DIPA (data terlampir).

- b. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan ATKP Medan sebesar Rp2.129.859.910,- yang merupakan dana kerjasama diklat yang dialokasikan untuk honorarium dosen/instruktur, catering, akomodasi dosen terbang. Dana tersebut terdiri dari :
- Dana Diklat Basic Avsec PT. AP II Rp750.331.120,-
  - Dana Diklat P3B PT. AP II Rp273.872.500,-
  - Dana Diklat P3UK PT. AP II Rp337.820.000,-
  - Dana Taruna (SPPL, Laundry,dll) Rp767.836.290,-
- c. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan ATKP Makassar Rp1.754.133.882,- yang akan digunakan kembali periode berikutnya terdiri dari :
- SPPL Rp193.185.000,- yang belum disetor ke kas Negara dan nantinya akan disetorkan;
  - Non SPPL Rp1.560.948.882,- yang diluar mekanisme APBN dan digunakan langsung untuk kebutuhan Taruna/Taruni.

Transaksi Penambahan dan Pengurangan Dana Diklat ATKP Makassar Tahun 2013 sebagai berikut :

Penerimaan sesuai mekanisme APBN :				
URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
<b>SPPL</b>				
Sewa Ruang Asrama	Rp 71.820.000	Rp 33.480.000	Rp 40.905.000	Rp 64.395.000
Uang Diklat (Sekolah)	Rp 95.760.000	Rp 44.640.000	Rp 54.540.000	Rp 85.860.000
Kesehatan/Poliklinik	Rp 47.880.000	Rp 22.320.000	Rp 27.270.000	Rp 42.930.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 215.460.000</b>	<b>Rp 100.440.000</b>	<b>Rp 122.715.000</b>	<b>Rp 193.185.000</b>
<b>NON SPPL</b>				
Ekstra Fooding & Cucian	Rp 53.262.500	Rp 414.900.000	Rp 328.507.500	Rp 139.655.000
Perlengkapan Taruna	Rp 223.099.250	Rp 212.296.000	Rp 229.579.818	Rp 205.815.432
PKL	Rp 298.200.000	Rp 282.400.000	Rp 254.800.000	Rp 325.800.000
Ekstrakurikuler		Rp 271.159.000	Rp 27.820.000	Rp 243.339.000
Asuransi	Rp 96.629.800	Rp 69.424.000	Rp 69.424.000	Rp 96.629.800
Rekreasi	Rp 39.051.000	Rp 209.100.000	Rp 9.800.000	Rp 238.351.000
Obat - obatan	Rp 48.385.625	Rp 139.576.000	Rp 22.474.075	Rp 165.487.550
Pemantapan	Rp 52.871.100	Rp 93.000.000		Rp 145.871.100
Registrasi		Rp 24.800.000	Rp 24.800.000	Rp -
Dana Kerjasama Diklat	Rp 90.893.672	Rp 2.859.313.219	Rp 2.950.206.891	Rp -
Pendaftaran Sipencatar	Rp -	Rp 18.130.000	Rp 18.130.000	Rp -
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 902.392.947</b>	<b>Rp 4.594.098.219</b>	<b>Rp 3.935.542.284</b>	<b>Rp 1.560.948.882</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 1.117.852.947</b>	<b>Rp 4.694.538.219</b>	<b>Rp 4.058.257.284</b>	<b>Rp 1.754.133.882</b>

Saldo Kas sebesar Rp3.919.292.792,- merupakan saldo penerimaan PNBP diluar mekanisme sebelum PP. 74 tahun 2013 terbit, sehingga saldo penerimaan PNBP tersebut akan disetorkan ke Kas Negara pada kesempatan pertama. Sedangkan untuk anggaran tahun 2014, untuk Satker yang belum berstatus BLU penerimaan SPPL akan diberlakukan sesuai dengan PP. 74 Tahun 2013 dan akan disetorkan langsung ke kas negara sesuai peraturan yang berlaku.

Terdapat koreksi kurang setor senilai Rp1.016.026.507,00 atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Bendahara Penerimaan KSOP Kepulauan Seribu dimana sebelumnya akun Kas di Bendahara Penerimaan telah tercatat di Neraca Satker sebesar Rp316.226.759,00. Kekurangan kas senilai tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan telah disetorkan ke Kas Negara. Atas SKTJM tersebut telah dicatat sebagai Piutang Bagian Lancar Tuntutan Tagihan TP/TGR.

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp424,61 Miliar*

### C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp424.615.684.680,- dan sebesar Rp3.329.183.847,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas tersaji pada Tabel 19.

Tabel 19.  
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TA 2013	TA 2012
Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	Rp 87.814	Rp 310.400
Pajak yang belum disetor	Rp 37.110.175	Rp 200.000
Honor kegiatan yang belum dibagikan	Rp 33.000	
Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara	Rp 1.019.250	
Kewajiban kepada pihak ketiga	Rp 422.362.314.750	Rp 221.259.350
Ekuitas dana lancar lainnya	Rp 2.193.289.391	Rp 3.080.936.942
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp .	Rp 26.477.155
Uang makan pegawai yang belum dibagikan	Rp 21.830.300	Rp .
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 424.615.684.680</b>	<b>Rp 3.329.183.847</b>

Tabel 20.  
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I

No	Uraian Eselon I	Jenis Transaksi	Jumlah
1	Sekretariat Utama	- Kewajiban kepada pihak ketiga (tunkin)	Rp 422.358.174.000
2	Ditjen Perhubungan Darat	- Jasa Giro yang Belum Disetor ke Kas Negara	Rp 28.487
		- Kewajiban kepada pihak ketiga	Rp 4.140.750
		- Pengembalian Belanja yang blm Disetor ke Kas Negara	Rp 3.000
3		Ditjen Perhubungan Laut	- Jasa Giro yang Belum Disetor ke Kas Negara
		- Honor kegiatan yang belum dibagikan	Rp 33.000
		- Ekuitas dana lancar lainnya dari Hibah Langsung	Rp 2.193.289.391
4		Ditjen Perhubungan Udara	- Uang makan pegawai yang belum dibagikan
		- Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	Rp 2.535.175
5	Badan PSDM Perhubungan	- Pengembalian Belanja yang blm Disetor ke Kas Negara	Rp 1.016.250
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 424.615.684.680</b>

Jumlah tersebut di atas belum dilakukan penyetoran ke kas negara dan pendistribusian kepada pihak yang terkait.

*Kas pada BLU  
Rp193,15 Miliar*

#### C.1.4 Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp193.152.487.378,- dan Rp161.040.871.577,-. Kas pada BLU ini merupakan saldo penerimaan kas yang berasal dari pendapatan BLU yang belum digunakan, terdapat pada 7 (tujuh) Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 21.  
Besarnya Saldo Kas pada masing-masing BLU

No	Nama satker	31-Des-13	31-Des-12
1	STIP JAKARTA	Rp 61.443.347.746	Rp 47.720.408.641
2	BP3IP JAKARTA	Rp 81.703.167.781	Rp 58.641.080.798
3	PIP SEMARANG	Rp 18.699.039.932	Rp 13.677.658.652
4	PIP MAKASSAR	Rp 17.608.020.146	Rp 16.777.337.087
5	PKTJ TEGAL	Rp 4.682.254.717	Rp 2.883.359.352
6	ATKP SURABAYA	Rp 8.375.854.481	Rp 5.007.222.913
7	POLTEKPEL SURABAYA	Rp 640.802.575	Rp 16.333.804.134
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 193.152.487.378</b>	<b>Rp 161.040.871.577</b>

Terdapat Perbedaan Kas Badan Layanan Umum pada Laporan Neraca SAP dan Laporan Neraca BLU sebagai berikut :

Tabel 22.  
Perbedaan Rincian Kas BLU Pada Laporan Neraca SAP  
dan Laporan Neraca BLU

No	Nama Satker	Kas BLU SAP	Kas BLU SAK	SELISIH
1	STIP JAKARTA	Rp 61.443.347.746	Rp 61.443.347.746	Rp -
2	BP3IP JAKARTA	Rp 81.703.167.781	Rp 81.703.167.781	Rp -
3	PIP SEMARANG	Rp 18.699.039.932	Rp 18.699.039.932	Rp -
4	PIP MAKASSAR	Rp 17.608.020.146	Rp 22.321.783.390	Rp (4.713.763.244)
5	PKTJ TEGAL	Rp 4.682.254.717	Rp 4.682.254.717	Rp -
6	ATKP SURABAYA	Rp 8.375.854.481	Rp 8.375.854.481	Rp -
7	POLTEKPEL SURABAYA	Rp 640.802.575	Rp 640.802.575	Rp -
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 193.152.487.378</b>	<b>Rp 197.866.250.622</b>	<b>Rp (4.713.763.244)</b>

Pada PIP Makassar untuk Neraca SAP diinput jurnal sebagai Pendapatan diterima dimuka pada Barang/Jasa yang harus diserahkan. Pada saat tanggal pelaporan SP2D yang telah diterima belum ada pengesahan menjadi SP3BLU sehingga belum dapat diakui sebagai pendapatan BLU.

Investasi Jk Pendek  
BLU  
Rp25,02 Miliar

#### C.1.5 Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek adan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp25.023.013.699,- dan Rp0,- yang merupakan Investasi Jangka Pendek BP2IP Surabaya. Investasi Jangka Pendek ini adalah penempatan deposito 1 bulan ARO (*Automatic Roll Over*) yang diblokir selama 1 (satu) tahun pada PT. Bank BNI 46 sebesar Rp20.000.000.000,- dan PT. Bank BTN sebesar Rp5.023.013.699,-, masa berakhirnya blokir pada bulan Oktober 2014.

Belanja Dibayar  
Dimuka  
Rp219.863.167

#### C.1.6 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Jumlah Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp219.863.167,- dan Rp160.596.995,- merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan atau perjanjian.

Tabel 23.  
Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I

No	Eselon I	31-Des-13	31-Des-12	Kenaikan / (penurunan)
1	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 152.083.334	Rp -	Rp 152.083.334
2	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp -
3	Badan PSDM Perhubungan	Rp 7.779.833	Rp 100.596.995	Rp (92.817.162)
<b>Total</b>		<b>Rp 219.863.167</b>	<b>Rp 160.596.995</b>	<b>Rp (92.817.162)</b>

Belanja Dibayar Dimuka pada Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp152.083.334,- merupakan pembayaran sewa gedung kantor pada Propinsi Bali sedangkan pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp60.000.000,- merupakan sewa gedung kantor KSOP Malahayati untuk tahun anggaran 2014, sedangkan pada Badan PSDM Perhubungan senilai Rp7.779.833,- merupakan Asuransi Taruna ATKP Surabaya yang terdiri atas :

TANGGAL	NOMOR	URAIAN	PERIODE	JUMLAH	SISA 2013
29/10/2013	0475/X/13/K	ASURANSI BUMIDA 19 SEPT 2013-2014	19 SEPT 2013-2014	Rp 10.282.000	Rp 7.711.500
02/12/2013	0667/XII/13/K	BUMIDA 2 ORANG PERIODE 7 NOP 2013 - 7 NOP 2014	PERIODE 7 NOP 2013 - 7 NOP 2014	Rp 82.000	Rp 68.333
<b>TOTAL TAHUN 2013</b>				<b>Rp10.364.000</b>	<b>Rp7.779.833</b>

*Uang Muka  
Belanja Rp22.22,-*

### C.1.7 Uang Muka Belanja (*Prepayment*)

Jumlah Uang Muka Belanja (*prepayment*) per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp22.216.828.700,- dan Rp19.835.100.558,-. Terhadap saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp19.835.100.558,- berupa Belanja Modal Dibayar Dimuka atas kegiatan pembangunan tahun 2012 telah selesai sampai dengan 31 Desember 2013 sehingga saldo uang muka belanja (*prepayment*) menjadi Rp0,-.

Terdapat koreksi BPK RI yang terdiri atas :

- Senilai Rp 4.312.690.030,- untuk mereklasifikasi pekerjaan Kapal Patroli Kelas IV sebanyak 4 (empat) unit yang progress fisiknya belum selesai per 31 Desember 2013 pada Satker Peningkatan Fungsi KPLP Pusat termasuk PPN 10%, biaya supervisi, honorarium tim teknis, dan dokumen pelelangan.
- Senilai Rp 13.358.740.450,- untuk mencatat nilai pekerjaan yang masih harus dikerjakan kembali oleh kontraktor senilai Rp12.144.309.500,00 (belum PPN10%) terhadap 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan radar pada satker yang belum selesai. Keempat paket pekerjaan tersebut telah dibayar lunas 100%.
- Senilai Rp 4.545.398.220,- untuk mencatat nilai pekerjaan yang masih harus dikerjakan oleh kontraktor pada Satker Pembangunan Jalur Ganda Tanah Abang - Serpong - Maja - Merak berupa Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Besar yang belum selesai.

Piutang Bukan  
Pajak  
Rp167.36 Miliar

### C.1.8 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp167.358.155.328,- dan Rp146.322.771.124,- yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Tabel 24.  
Piutang Bukan Pajak per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-13	31-Des-12	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretaris Jenderal	Rp 64.375.994	Rp 42.750.058	Rp 21.625.936
2	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 1.293.935.375	Rp .	
3	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 128.372.711.687	Rp 137.473.441.366	Rp (9.100.729.679)
4	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 27.208.566.660	Rp 8.781.124.700	Rp 18.427.441.960
5	Ditjen Perkeretaapian	Rp 45.176.400		
5	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 10.373.389.212	Rp 25.455.000	Rp 10.347.934.212
	<b>Total</b>	<b>Rp 167.358.155.328</b>	<b>Rp 146.322.771.124</b>	<b>Rp 19.696.272.429</b>

Piutang Bukan Pajak Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2013 sebesar Rp64.375.994,- merupakan piutang yang berasal dari sewa rumah dinas satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang disebabkan pembayarannya dilakukan secara langsung tidak melalui pemotongan gaji.

Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Darat merupakan koreksi BPK yang terdiri dari :

- Koreksi terhadap nilai aset tetap karena adanya kelebihan pembayaran senilai Rp122.949.455,20 (belum PPN 10%) pada kontrak no.PL.102/9/19/SATKER-LLAJ/2013 tanggal 22 April 2013 yang belum disetorkan ke Kas Negara namun telah ada surat tagihan dari KPA kepada kontraktor dan surat kesanggupan penyetoran dari kontraktor.
- Koreksi terhadap nilai aset tetap karena adanya kekurangan volume terpasang senilai Rp203.955.800,00 (belum PPN 10%) pada kontrak no.PL.102/15/14/SATKER-LLAJ/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang yang belum disetorkan ke Kas Negara namun telah ada surat tagihan dari KPA kepada kontraktor.

- Koreksi terhadap nilai aset tetap karena adanya kelebihan pembayaran senilai Rp967.030.119,81 (belum PPN 10%) pada kontrak no.01/PTSDP-KTR/Kons-M/DGVI/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang telah diterbitkan surat tagihan dari KPA kepada kontraktor dan akan diperhitungkan pada saat pengajuan SPM atas volume yang belum terbayarkan (realisasi pembayarannya 86,445% karena pengajuan SPM-LS terakhir/progress 100% gagal bayar).

Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Laut per 31 Desember 2013 sebesar Rp128.372.711.687,- merupakan piutang yang berasal dari Jasa Kepelabuhan dan Kenavigasian dan terdapat koreksi BPK berupa :

- Koreksi terhadap nilai Aset Tak Berwujud karena adanya kelebihan pembayaran atas jasa konsultasi yaitu biaya langsung nonpersonil yang direalisasikan dari belanja modal senilai Rp204.000.000,00 (belum PPN 10%) yang belum disetorkan ke Kas Negara namun telah ada surat tagihan dari KPA kepada kontraktor dan surat kesanggupan penyetoran dari kontraktor.
- Koreksi terhadap nilai Aset Tak Berwujud karena adanya kelebihan pembayaran atas jasa konsultasi yaitu biaya langsung nonpersonil yang direalisasikan dari belanja modal senilai Rp380.420.000,00 (belum PPN 10%) yang belum disetorkan ke Kas Negara namun telah ada surat tagihan dari KPA kepada kontraktor.

Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Udara per 31 Desember 2013 sebesar Rp27.208.566.660,- merupakan piutang berasal dari jasa Bandar Udara dan terdapat koreksi BPK berupa :

- Koreksi terhadap nilai aset tetap Gedung Bangunan karena adanya kelebihan pembayaran senilai Rp269.800.275,02 (belum PPN 10%) pada kontrak no.KONTRAK/PPK-OBSH/PL.04 tanggal 4 Juni 2013 dan senilai Rp17.999.148,15 (belum PPN 10%) pada kontrak no.KONTRAK/PPK-OBSH/PL.08 tanggal 19 Juni 2013; serta aset Peralatan dan Mesin senilai Rp114.000.000,00 (belum PPN 10%) pada kontrak no.KONTRAK/PPK-OBSH/PL.09 tanggal 12 Juli 2013 yang belum disetorkan ke Kas Negara namun telah ada surat tagihan dari KPA kepada kontraktor.

Piutang Bukan Pajak Ditjen Perkeretapiian senilai Rp 45.176.400,00 berupa koreksi BPK terhadap nilai aset tetap karena adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp45.176.400,00 (belum PPN 10%) pada Pekerjaan Pengadaan 2 Set (@ 4 Unit) Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) Kontrak Tahun Jamak 2012-2013 yang belum disetorkan ke Kas Negara namun telah ada surat tagihan dari KPA kepada kontraktor.

Piutang Bukan Pajak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan senilai Rp10.373.389.212,- terdiri atas :

No	Nama satker	31-Des-13	31-Des-12
1	PPSDM Perhubungan Darat	Rp 520.904.000	Rp -
2	PIP Makassar	Rp 14.995.000	Rp 25.455.000
3	BPP Pnb Jayapura	Rp 4.718.000	Rp -
4	ATKP Makassar	Rp 10.200.000	Rp -
5	BPP Pnb Palembang	Rp 2.155.000	Rp -
6	PPSDM Perhubungan Laut	Rp 6.278.821.167	Rp -
7	PKTJ Tegal	Rp 1.803.780.878	Rp -
8	STPI Curug	Rp 1.618.646.000	
9	Sekretaria BPSDM	Rp 119.169.172	Rp -
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 10.373.389.217</b>	<b>Rp 25.455.000</b>

Piutang Bukan Pajak tersebut terdapat pada :

1. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang keseluruhannya adalah merupakan piutang permakanan Taruna Rp14.995.000,-
2. BPP Pnb Jayapura yang merupakan denda keterlambatan pekerjaan CV. Sinar Konstruksi Rp4.718.000,-
3. ATKP Makassar yang merupakan pendapatan pendidikan lainnya yang berasal dari sertifikat diklat Avsec sebanyak 102 orang @ Rp100.000,-
4. BPP Pnb Palembang yang merupakan pengakuan PNBPN dari pendapatan pemanfaatan BMN PT. Karunia Jaya Agung.
5. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut memiliki piutang bukan pajak berupa :
  - a. Sisa progres pekerjaan konstruksi BP2IP Padang Pariaman Tahap II sebesar Rp5.134.454.055,-
  - b. Sisa Progres Pekerjaan MK BP2IP Padang Pariaman Tahap II sebesar Rp110.906.554,-
  - c. Sisa progres pekerjaan konstruksi BP2IP Minahasa Selatan Tahap I sebesar Rp731.756.500,-

- d. Sisa progres pekerjaan Manajemen konstruksi BP2IP Minahasa Selatan Tahap I sebesar Rp13.123.958,-.
  - e. Sisa progres pekerjaan konstruksi BP2IP Sorong Tahap IV sebesar Rp281.012.990,-.
  - f. Sisa progres pekerjaan Manajemen konstruksi BP2IP Sorong tahap IV sebesar Rp7.567.110,-.
6. PKTJ Tegal yang merupakan merupakan keterlambatan pekerjaan penyelesaian pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II T.A 2013 PT. Galih Medan Persada senilai Rp1.803.780.878,-
  7. STPI Curug yang merupakan Klaim Jaminan sebesar Rp1.607.306.000 . Klaim Jaminan ini merupakan pencairan jaminan/ garansi bank atas pekerjaan Pembangunan Asrama Reguler Tahap I yang akan dicairkan sebesar Rp1.328.106.000 dan pekerjaan Perawatan Overhaul Pesawat Latih Rp279.200.000 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2013, serta Uang Pendidikan sebesar Rp11.340.000 yang merupakan tagihan uang pendidikan Taruna KP Angkatan 4 sebesar Rp6.210.000 dan Taruna PA Angkatan 10 sebesar Rp5.130.000 yang belum dibayar dikarenakan sedang OJT (*On the Job Training*) yang diperkirakan baru selesai di bulan Februari 2014.
  8. Pada Satker PPSDM Perhubungan Darat ada pekerjaan Pembangunan BPPTD Kalimantan Tahap I sesuai dengan kontrak nomor : 02\_SP/BPPTD/KONS/PPSDMPD/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dan Addendum Kontrak Nomor : 02/ADD\_BPPTD/KONS/PPSDMPD/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 yang hanya dapat diselesaikan sebesar 95% atas pekerjaan fisik, sehingga terdapat pencairan Jaminan Bank/Bank Garansi Nomor : 023017130317 sebesar Rp520.904.000,-.
  9. Pada Satker Sekretariat BPSDM Perhubungan merupakan koreksi BPK terhadap nilai aset tetap karena adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp119.169.171,91 (belum PPN 10%) pada Pembangunan Karakter Aparatur Perhubungan Tahap I yang belum disetorkan ke Kas Negara namun telah ada surat tagihan dari KPA kepada kontraktor.

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang Bukan  
Pajak (Rp53.17  
Miliar)

### C.1.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar (Rp19.276.250.570,-) dan (Rp28.407.901.233,-) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Pada Tahun 2013 Kementerian Perhubungan secara bertahap telah menerapkan Penyisihan Piutang Tak Tertagih piutang sesuai PMK 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penerapan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada neraca belum dilakukan secara konsisten dan memadai pada neraca kantor/satker, disajikan secara bertahap pada kantor/satker yang telah siap sesuai kondisi piutang dan kualitasnya di lapangan. Hal ini karena PMK 201/PMK.06/2011 dan peraturan turunannya yaitu Perdirjen Perbendaharaan Nomor 82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga belum semua disosialisasikan Kementerian Perhubungan kepada kantor/satker.

Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih didasarkan atas kualitas piutang yaitu piutang lancar sebesar 5%, piutang kurang lancar 10%, piutang diragukan sebesar 50% dan piutang macet sebesar 100%. Untuk piutang yang telah diserahkan ke DJKN tidak dibentuk penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100% (macet) karena telah direklasifikasi ke aset lain-lain.

Tabel 25.  
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak per Eselon I

Kode	Eselon I	Kualitas Piutang				Saldo Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Sekretaris Jenderal		Rp 64.375.994			Rp 64.375.994
2	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 1.293.935.375				Rp 1.293.935.375
3	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 110.247.978.848	Rp -	Rp 109.948.456	Rp 18.014.784.383	Rp 128.372.711.687
4	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 26.033.561.051	Rp 718.339.780	Rp 143.575.656	Rp 313.090.173	Rp 27.208.566.660
5	Ditjen Perkeretapian	Rp 45.176.400				Rp 45.176.400
4	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 10.363.012.212	Rp 1.970.000	Rp 6.790.000	Rp 1.615.000	Rp 10.373.387.212
	<b>Total Piutang</b>	<b>Rp 147.983.663.886</b>	<b>Rp 784.685.774</b>	<b>Rp 260.314.112</b>	<b>Rp 18.329.489.556</b>	<b>Rp 167.358.153.328</b>
	% Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
	<b>Total Penyisihan</b>	<b>Rp 738.135.381</b>	<b>Rp 78.468.577</b>	<b>Rp 130.157.056</b>	<b>Rp 18.329.489.556</b>	<b>Rp 19.276.250.570</b>

*BL Tagihan  
TP/TGR Rp25.70  
Miliar*

### C.1.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp25.703.566.497,- dan Rp287.903.313.703,- yang merupakan tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TGR) yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Saldo per 31 Desember 2012	287.903.313.703
Mutasi tambah:	
- Bag lancar TP/TGR 2014	11.916.050
- Bag Lancar TP/TGR pada Satker Prasarana Jabotabek	13.600.980
- Bag Lancar TP/TGR pada Satker Pengembangan Per-KA Jabar	3.178.144.500
- SKTJM Bendahara Penerimaan KSOP Kepulauan Seribu	1.016.026.507
Mutasi kurang ;	
- Pelunasan Indikasi Kerugian Negara yang sudah terbit SKTJM	(263.169.789.763)
- Pelunasan Bagian Lancar selama 2013	(3.249.645.480)
Saldo per 31 Desember 2013	25.703.566.497

#### Ditjen Perhubungan Darat

Pada Ditjen Perhubungan Darat terdapat pada satker Pengembangan LLASDP Sumatera Utara sebesar Rp1.663.059.262,- yang terdiri dari pemahalan harga sebesar Rp1.519.126.195,- dan kurang volume pekerjaan sebesar Rp143.933.067,-. Terhadap kerugian negara sebesar Rp1.663.059.262 telah disetorkan ke kas negara pada tahun 2013.

#### Ditjen Perhubungan Laut

Pada Ditjen Perhubungan Laut terdapat tuntutan ganti rugi sebesar Rp280.924.871.973,- terdiri atas pemahalan harga sebesar Rp209.287.732.208,-, kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp61.526.234.086,- dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar Rp10.110.905.679,-. Selama tahun 2013 telah dilakukan pelunasan Rp256.261.248.033,-. Terdapat koreksi BPK berupa SKTJM Bendahara Penerimaan KSOP Kepulauan Seribu sebesar Rp1.016.026.507,-

**Ditjen Perhubungan Udara**

Pada Ditjen Perhubungan Udara terjadi pemahalan harga dan kurang volume pekerjaan sebesar Rp2.121.519.183,- yang terdiri dari :

SATKER	PEMAHALAN (Rp)	KURANG VOLUME	JUMLAH KERUGIAN NEGARA (Rp)	POSISI TINDAK LANJUT
DIREKTORAT BANDAR UDARA	834.841.975,-	217.250.157,	1.052.092.132,-	Telah disetor ke kas negara tanggal 20 Mei 2013 Rp282.407.653,- dan tanggal 23 Mei 2013 Rp769.584.479,-, bukti setor telah disampaikan kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK-RI
BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN	1.069.427.051,-		1.069.427.051,-	Telah disetor ke Kas Negara tanggal 17 Mei 2013, bukti setor telah disampaikan kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK-RI
<b>TOTAL</b>			<b>2.121.519.183,-</b>	

**Ditjen Perkeretaapian**

Pada Ditjen Perkeretaapian terdapat pada satker Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara sebesar Rp3.123.963.285,- yang terdiri dari pemahalan harga sebesar Rp1.398.275.716,- dan kurang volume pekerjaan sebesar Rp1.725.687.569,-. Terhadap potensi kerugian negara sebesar Rp3.123.963.285,- telah disetor ke kas negara.

Terdapat juga Bagian Lancar TP/TGR berupa :

- Terdapat kelebihan pembayaran pada Satker Prasarana Jabotabek atas temuan Inspektorat Jenderal sebesar Rp13.600.980,- berupa kelebihan pembayaran yang dibayarkan pada bulan Februari 2014
- Temuan BPK RI pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Barat senilai Rp3.178.144.500,- berupa pemahalan harga dan kekurangan volume yang disetorkan pada bulan Januari 2014.

Terhadap temuan tersebut di atas telah dilakukan koreksi bagian lancar TP/TGR karena telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada Tahun 2014.

Penyisihan piutang  
tak tertagih – BL  
TP TGR  
(Rp128.517.833,-)

### C.1.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar (Rp128.517.833,-) dan (Rp215.000,-) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 26.

#### Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BL TP/TGR per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-13	31-Des-12	Kenaikan / (penurunan)
03	Ditjen Perhubungan Darat	0		0
04	Ditjen Perhubungan Laut	(128.457.833)	(155.000)	(128.302.833)
05	Ditjen Perhubungan Udara	(60.000)	(60.000)	0
08	Ditjen Perkeretaapian	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>(128.517.833)</b>	<b>(215.000)</b>	<b>(128.302.833)</b>

Piutang Kegiatan  
Operasional BLU  
Rp2,65 Miliar

### C.1.12 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2013 per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.656.899.000,- dan Rp1.617.931.020,- yang terdapat pada Eselon I Badan Pengembangan SDM Perhubungan atas 2 (dua) satker BLU yaitu:

Tabel 27.

#### Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker BLU

No.	Uraian Satker	Jumlah Debitur	Jumlah
1	STIP JAKARTA	749 Rp	579.230.000
2	ATKP Surabaya	8 Rp	1.646.969.000
3	Poltekel Surabaya		Rp 430.700.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>757 Rp</b>	<b>2.656.899.000</b>

Sedangkan mutasi Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	Rp	1.617.931.020
Mutasi tambah:		
- Piutang Pendapatan Jasa Pendidikan BLU	Rp	2.656.899.000
Mutasi kurang:		
- Pelunasan	Rp	(1.617.931.020)
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	2.656.899.000

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Mutasi tambah :**

- 1) Mutasi tambah sebesar Rp579.230.000,- pada Satker STIP Jakarta merupakan Piutang Kerjasama pendidikan dan pelatihan yang berasal dari piutang Pendidikan Diploma Taruna/i Rp196.180.000,-, Piutang Upgrading (ANT dan ATT) Rp370.250.000,-, Piutang Refresing (ANT dan ATT) Rp12.800.000,-.
- 2) Mutasi tambah dari ATKP Surabaya yaitu Piutang Diklat Pelatihan sebesar Rp1.646.969.000,- dirinci sebagai berikut :

BUKTI	TANGGAL	URAIAN			PIUTANG BRUTO
		NAMA	COURSE	SEMESTER	BALANCE (Rp)
00060JU	01/09/2013	MARGA RIANA	TNU V	SEMESTER I	8.200.000
5124/IX/ 13/D	26/09/2013	ARIF ROCHMAD	TPU III A	SMSTER IV	9.500.000
00058JU	30/09/2013	MARGA RIANA	TNU V	SEMESTER II	13.650.000
TOTAL JUMLAH PIUTANG S/D SEPTEMBER 2013					13.650.000
					-
1003JU	31/12/2013	BANGLAN IX			450.549.000
1003JU	31/12/2013	GARBARATA			773.699.000
1003JU	31/12/2013	X RAY			1.053.679.000
1003JU	31/12/2013	CCTV			1.323.539.000
1003JU	31/12/2013	A2B			1.633.319.000
TOTAL JUMLAH PIUTANG DIKLAT PELATIHAN					1.633.319.000
TOTAL JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG					1.646.969.000

- 3) Mutasi Tambah dari Poltekpel Surabaya sebesar Rp430.700.000,- yang merupakan piutang pendapatan dari diklat tambahan Akademi Maritim Cirebon sebesar Rp159.968.000,- diklat praktek tambahan SMK Pelayaran Samarinda sebesar Rp57.540.000,- Sewa peralatan laundry sebesar Rp120.000.000,- sewa ruang makan Rp78.720.000,- dan sewa ruang mini market sebesar Rp14.472.000,-. Adapun mutasi kurang berupa pelunasan Piutang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.617.931.020,-.

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar (Rp53.146.683)*

**C.1.13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU**

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar (Rp53.146.683,-) dan (Rp47.951.843,-). Yang terdapat pada BP2IP Surabaya, STIP Jakarta, dan ATKP Surabaya.

Tabel 28.

**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Operasional BLU**

Satker	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
STIP	Macet	Rp 40.062.500	100,00%	Rp 40.062.500
	Lancar	Rp 539.167.500	0,50%	Rp 2.695.838
ATKP Surabaya	Lancar	Rp 1.646.969.000	0,50%	Rp 8.234.845
Poltekpel Surabaya	Lancar	Rp 430.700.000	0,50%	Rp 2.153.500
<b>Total</b>		<b>Rp 2.656.899.000</b>		<b>Rp 53.146.683</b>

*Piutang Kegiatan  
Non Operasional  
BLU Rp.0*

### C.1.14 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Jumlah Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp0,- dan Rp42.357.400,- yang terdapat pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berupa piutang sewa ruangan untuk kantin dan rumah dinas.

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp</b>	<b>42.357.400</b>
Mutasi tambah:		
- Piutang pendapatan Jasa lain	Rp	21.302.800
Mutasi kurang:		
- Pelunasan Tahun 2012	Rp	(42.357.400)
- Pelunasan pada semester 2 tahun 2013	Rp	(21.302.800)
<b>Saldo 31 Desember 2013</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah sebesar Rp21.302.800,- merupakan Piutang sewa ruangan untuk kantin dan sewa rumah dinas di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
- Mutasi kurangnya adalah pelunasan piutang kegiatan non operasional BLU tahun 2012 dan pelunasan atas piutang pendapatan pada semester 2 tahun 2013.

*Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang dari  
Kegiatan Non  
Operasional BLU  
Rp 0*

### C.1.15 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp0,- dan (Rp211.787,-) yang terdapat pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yaitu sebesar 0,5% dari total Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU dengan kualitas lancar sebesar Rp21.302.800,-

Tabel 29.  
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan  
Non Operasional BLU

Satker	Kualitas	Penyisihan TA. 2013	Penyisihan TA. 2012
STIP	Macet	-	
	Lancar	-	Rp 211.787
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>Rp 211.787</b>

Persediaan  
Rp266.94 Miliar

### C.1.16 Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp266.937.363.154,- dan Rp156.094.840.054,-. Nilai Persediaan tersebut sudah termasuk Persediaan Badan Layanan Umum sebesar Rp2.931.815.998,- yang terdapat pada 7 (tujuh) satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 30.

#### Rincian Persediaan per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-13	31-Des-12	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretariat Jenderal	Rp 330.267.816	Rp 456.700.327	Rp (126.432.511)
02	Inspektorat Jenderal	Rp 11.660.425	Rp 21.267.650	Rp (9.607.225)
03	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 56.397.918.563	Rp 7.673.163.505	Rp 48.724.755.058
04	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 108.849.003.346	Rp 81.191.331.537	Rp 27.657.671.809
05	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 95.016.837.048	Rp 61.516.337.654	Rp 33.500.499.394
08	Ditjen Perkeretaapian	Rp 2.234.170.306	Rp 2.945.638.900	Rp (711.468.594)
11	Badan Litbang Perhubungan	Rp 19.900.900	Rp 11.978.975	Rp 7.921.925
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 4.077.604.750	Rp 2.278.421.506	Rp 1.799.183.244
	<b>Total</b>	<b>Rp 266.937.363.154</b>	<b>Rp 156.094.840.054</b>	<b>Rp 110.842.523.100</b>

Nilai persediaan yang disajikan pada neraca per eselon I merupakan nilai berdasarkan hasil laporan keuangan masing-masing eselon I yang sudah dilakukan *stock opname*.

Tabel 31.

#### Rincian Persediaan masing-masing satker Badan Layanan Umum

No	Nama Satker	TA. 2013	TA. 2012
1	Poltekpel Surabaya	Rp 251.213.238	Rp 86.272.000
2	ATKP Surabaya	Rp 475.400	Rp 621.750
3	PIP Semarang	Rp 943.063.554	Rp 32.767.087
4	BP 3IP Jakarta	Rp 943.074.900	Rp 820.563.348
5	STIP Jakarta	Rp 259.095.430	Rp 112.568.775
6	PKTJ Tegal	Rp 312.261.900	Rp 4.600
7	PIP Makassar	Rp 222.631.576	Rp 252.783.646
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 2.931.815.998</b>	<b>Rp 1.305.581.206</b>

Nilai persediaan Badan Layanan Umum yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Laporan Keuangan masing-masing Badan Layanan Umum yang sudah dilakukan *stock opname*.

Tabel 32.  
Daftar Persediaan per 31 Desember 2013

Uraian	31-Des-13	31-Des-12	Kenaikan/(Penurunan)
Barang Konsumsi	42.604.772.106	34.718.111.463	7.886.660.643
Amunisi	70.226.810	70.226.324	486
Bahan Untuk Pemeliharaan	3.423.633.005	2.193.974.008	1.229.658.997
Suku Cadang	122.911.589.775	82.693.982.383	40.217.607.392
Persediaan Untuk di Jual/diserahkan Kepada	53.202.524.642	5.243.837.360	47.958.687.282
Pita Cukai, Materai dan Leges	2.485.500	2.549.000	(63.500)
Bahan Baku	13.523.874.090	13.178.820.752	345.053.338
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	5.696.761.840	106.320.680	5.590.441.160
Persediaan lainnya	25.501.495.386	17.887.018.084	7.614.477.302
<b>Jumlah</b>	<b>266.937.363.154</b>	<b>156.094.840.054</b>	<b>110.842.523.100</b>

Aset Tetap  
Rp143,51 Triliun

## C.2 ASET TETAP

Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp143.507.204.560.291,- dan sebesar Rp158.623.798.919.876,- yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 33.  
Posisi Aset Tetap

No.	Uraian	31-Dec-13	31-Des-12	Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	Rp 58.654.409.753.031	Rp 51.452.192.910.982	Rp 7.202.216.842.049
2	Peralatan dan Mesin	Rp 23.928.043.102.585	Rp 17.639.315.923.994	Rp 6.288.727.178.591
3	Gedung dan Bangunan	Rp 10.800.149.772.312	Rp 9.144.899.884.998	Rp 1.655.249.887.314
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 63.756.567.146.201	Rp 52.771.420.087.774	Rp 10.985.147.058.427
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 2.111.547.092.389	Rp 2.446.296.249.529	Rp (334.749.157.140)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 28.044.569.428.529	Rp 25.169.673.862.599	Rp 2.874.895.565.930
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 187.295.286.295.047</b>	<b>Rp 158.623.798.919.876</b>	<b>Rp 28.671.487.375.171</b>
	Akm. Penyusutan	Rp 43.788.081.734.756	Rp -	
	<b>Nilai Buku</b>	<b>Rp 143.507.204.560.291</b>	<b>Rp 158.623.798.919.876</b>	<b>Rp 28.671.487.375.171</b>

Posisi Aset Tetap tersebut sudah termasuk Aset Tetap yang ada pada 7 (tujuh) satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp3.633.970.890.854,- pada 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp3.448.626.660.867,-.

Tabel 34.  
Posisi Aset Tetap Badan Layanan Umum

No.	Uraian	31-Des-13	31-Des-12	Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	1.265.874.384.051	Rp 1.250.491.053.251	Rp 15.383.330.800
2	Peralatan dan Mesin	1.064.403.552.977	Rp 750.047.580.208	Rp 314.355.972.769
3	Gedung dan Bangunan	1.221.062.700.116	Rp 1.325.147.647.960	Rp (104.084.947.844)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.724.893.361	Rp 42.434.655.576	Rp 10.290.237.785
5	Aset Tetap Lainnya	17.400.241.482	Rp 13.053.107.171	Rp 4.347.134.311
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.505.118.867	Rp 56.216.277.370	Rp (43.711.158.503)
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.633.970.890.854</b>	<b>Rp 3.437.390.321.536</b>	<b>Rp 196.580.569.318</b>

Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 35.  
Daftar Perbandingan Aset Tetap antara  
Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2013

Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK BMN	Selisih
Tanah	Rp 58.654.409.753.031	Rp 58.654.409.753.031	0
Peralatan dan Mesin	Rp 23.928.043.102.585	Rp 23.928.043.102.585	0
Gedung dan Bangunan	Rp 10.800.149.772.312	Rp 10.800.149.772.312	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 63.756.567.146.201	Rp 63.756.567.146.201	0
Aset Tetap Lainnya	Rp 2.111.547.092.389	Rp 2.111.547.092.389	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 28.044.569.428.529	Rp 28.044.569.428.529	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 187.295.286.295.047</b>	<b>Rp 187.295.286.295.047</b>	<b>0</b>
Akm. Penyusutan	Rp 43.788.081.734.756	Rp 43.788.081.734.756	0
<b>Nilai buku</b>	<b>Rp 143.507.204.560.291</b>	<b>Rp 143.507.204.560.291</b>	<b>-</b>

Tidak terdapat perbedaan nilai Aset Tetap dalam neraca dengan Aset Tetap dalam SIMAK BMN.

Tanah Rp58,65  
Triliun

### C.2.1 Tanah

Nilai perolehan Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp58.654.409.753.031,- dan Rp51.452.192.910.982,-. Nilai ini sudah termasuk nilai Tanah yang ada pada satker Badan Layanan Umum yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.265.874.384.051,-. Mutasi Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 36.  
Rincian Mutasi Tanah

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>51.452.192.910.982</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Penambahan Saldo Awal	38.634.011.550
Pembelian	107.009.522.134
Hibah (Masuk)	44.337.093.090
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	403.407.981.866
Reklasifikasi Masuk	204.044.449.773
Perolehan Lainnya	32.101.400
Penyelesaian Pembangunan Langsung	14.705.234.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	240.000
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks	0
Pengembangan Nilai Aset	7.681.106.084
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	60.762.677.323
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	6.522.518.893.953
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	860.045.000
Pengembangan Melalui KDP	209.326.537.552
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	124.269.459.866
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-67.306.155.094
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-8.135.150
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	-65.173.988.167
Penghapusan	-4.628.500
Reklasifikasi Keluar	-223.452.727.460
Koreksi Pencatatan	-157.700.787.171
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-21.726.090.000
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>58.654.409.753.031</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013</b>	<b>0</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>58.654.409.753.031</b>

Peralatan dan  
Mesin  
Rp23.93 Triliun

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp23.928.043.102.585,- dan Rp17.639.315.923.994,-. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp13.704.553.866.273,-. Nilai ini sudah termasuk nilai Peralatan dan Mesin yang ada pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.064.403.552.977,-.

Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 37.  
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>17.639.315.923.994</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Penambahan Saldo Awal	199.780.124.329
Pembelian	544.238.512.162
Transfer Masuk	1.054.417.851.318
Hibah (Masuk)	54.930.249.596
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	5.271.838.361.159
Pembatalan Penghapusan	6.400.000
Reklasifikasi Masuk	3.315.942.313.367
Perolehan Lainnya	36.230.653.838
Penyelesaian Pembangunan Langsung	12.838.441.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	1.126.284.814
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks	103.700.000
Pengurangan Nilai Aset	0
Pengembangan Nilai Aset	37.226.293.147
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	18.055.141.435
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	273.271.200
Pengembangan Melalui KDP	99.211.323.489
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	212.700.583.685
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-87.911.729.722
Penghapusan	-2.045.094.718
Transfer Keluar	-936.579.934.810
Hibah (Keluar)	-123.709.275.300
Reklasifikasi Keluar	-3.085.864.931.397
Koreksi Pencatatan	-227.724.789.642
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	-11.320.752
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	-67.959.968.797
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	-460.100
Penghapusan semu karena reklasifikasi dar	-410.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-38.384.410.710
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>23.928.043.102.585</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013</b>	<b>10.223.489.236.312</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>13.704.553.866.273</b>

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp10,80 Triliun*

### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp10.800.149.772.312,- dan Rp9.144.899.884.998,-. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar

Rp 8.920.727.783.173,- Nilai Gedung dan Bangunan ini sudah termasuk nilai Gedung dan Bangunan yang ada pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.221.062.700.116,-.

Mutasi Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 38.**  
**Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan**

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>9.144.899.884.998</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Penambahan Saldo Awal	40.536.526.581
Pembelian	7.309.420.594
Transfer Masuk	51.579.846.774
Hibah (Masuk)	2.104.818.504
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.389.408.122.541
Reklasifikasi Masuk	516.454.707.712
Perolehan Lainnya	14.399.737.860
Penyelesaian Pembangunan Langsung	9.288.644.208
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	44.911.453.010
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks	959.925.001
Pengembangan Nilai Aset	25.447.266.031
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	63.993.081.018
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	18.957.386.748
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	1.908.845.586
Pengembangan Melalui KDP	365.495.385.464
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	1.822.806.422.917
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-25.418.094.032
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-9.068.978.506
Penghapusan	-5.004.746.309
Transfer Keluar	-120.330.431.546
Reklasifikasi Keluar	-642.231.885.700
Koreksi Pencatatan	-1.703.626.994.036
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	-122.078.982.303
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-92.551.590.803
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>10.800.149.772.312</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013</b>	<b>1.879.421.989.139</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>8.920.727.783.173</b>

**C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp63.756.567.146.201,- dan Rp52.771.420.087.774,-. Sedangkan nilai buku Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp32.081.698.405.490,-. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan ini sudah termasuk nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp52.724.893.361,-.

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 39.  
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>52.771.420.087.774</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Penambahan Saldo Awal	582.521.876.028
Pembelian	28.242.169.870
Transfer Masuk	271.648.942.002
Hibah (Masuk)	2.004.727.073
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	12.019.366.171.370
Reklasifikasi Masuk	5.481.317.907.181
Perolehan Lainnya	11.674.090.150
Penyelesaian Pembangunan Langsung	8.870.374.113
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	50.573.364.086
Pengembangan Nilai Aset	35.875.211.054
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	146.237.203.639
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	27.959.738.806
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	18.715.972.963
Pengembangan Melalui KDP	1.334.292.698.041
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	1.454.070.692.772
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Penghapusan	-9.387.286.000
Transfer Keluar	-400.071.190.690
Hibah (Keluar)	-3.636.465.173
Reklasifikasi Keluar	-6.779.817.141.291
Koreksi Pencatatan	-2.100.063.517.978
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	-1.109.081.047.733
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-86.167.431.856
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>63.756.567.146.201</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013</b>	<b>31.674.868.740.711</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>32.081.698.405.490</b>

Aset Tetap  
Lainnya  
Rp2.11 Triliun

### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.111.547.092.389,- dan Rp2.446.296.249.529,- yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Sedangkan nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp2.101.245.323.795,- Nilai Aset Tetap Lainnya ini sudah termasuk nilai Aset Tetap Lainnya pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan Rp 17.400.241.482,-

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebesar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 40.  
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>2.446.296.249.529</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Penambahan Saldo Awal	964.934.426
Pembelian	61.311.558.184
Transfer Masuk	13.200.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	379.446.018.399
Reklasifikasi Masuk	656.622.479.508
Perolehan Lainnya	72.199.655
Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.768.517.000
Pengembangan Nilai Aset	116.959.782.800
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	3.500
Pengembangan Melalui KDP	84.853.564.900
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	460.756.651
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-16.072.809.228
Transfer Keluar	-54.440.962.372
Reklasifikasi Keluar	-598.164.039.895
Koreksi Pencatatan	-1.913.481.450
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	-966.394.830.420
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-236.048.798
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>2.111.547.092.389</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013</b>	<b>10.301.768.594</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>2.101.245.323.795</b>

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp28,04 Triliun

### C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp28.044.569.428.529,- dan Rp25.169.673.862.599,-. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini sudah termasuk Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan Rp12.505.118.867,-.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 41.  
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP	31-Des-12	Penambahan	KDP Yang Menjadi Aset Definitif	31-Des-13
Tanah Dalam Pengerjaan	Rp 811.000.263.102	Rp 603.125.924.746	Rp 674.160.905.497	Rp 739.965.282.351
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Rp 3.323.459.569.028	Rp 4.058.290.290.919	Rp 3.926.135.989.706	Rp 3.455.613.870.241
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Rp 3.821.969.087.379	Rp 2.897.547.943.354	Rp 2.336.235.273.503	Rp 4.383.281.757.230
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	Rp 17.122.825.111.655	Rp 16.371.268.193.287	Rp 14.594.909.340.317	Rp 18.899.183.964.625
Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	Rp 90.419.831.435	Rp 597.313.242.491	Rp 121.208.519.844	Rp 566.524.554.082
Sub Total	Rp 25.169.673.862.599	Rp 24.527.545.594.797	Rp 21.652.650.028.867	Rp 28.044.569.428.529

Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa tanah Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada satker Pembangunan *Double-Double Track* senilai Rp21.726.090.000,- tidak diketahui keberadaan dan tidak didukung bukti kepemilikan. Ditjen Perkeretaapian sesuai rekomendasi BPK RI telah membentuk Tim untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengadaan tanah senilai Rp21.726.090.000,- yang tidak jelas keberadaannya dengan Surat Keputusan Dirjen Perkeretaapian No. KP. 801./SK.52/DJKA/06/11 tanggal 24 Juni 2011. Inspektorat Jenderal dengan surat PS.313/1/4/ITJEN-2012 tanggal 11 Januari 2012 telah melakukan penelusuran dan investigasi dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua BPK-RI perihal Hasil Audit Khusus Penelitian Keaslian dan Keabsahan Dokumen Pengadaan Tanah 2006 Satker Pembangunan *Double-Double Track*, saat ini permasalahan tersebut masih dalam proses penyidikan KPK.

Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Perhubungan telah mereklasifikasi ke akun Aset Lain-lain dalam kelompok Aset Lainnya.

Saldo KDP sebesar Rp25.169.673.862.599,00 antara lain termasuk nilai aset atas tujuh paket pekerjaan pada tiga satker yang belum diselesaikan hingga 31 Desember 2013, namun pembayaran sudah direalisasikan sebesar 100%. Ketujuh paket pekerjaan tersebut adalah:

Nama Satker	Nama Paket	Progres Pekerjaan	
		31 Des 2013	Cek Fisik (Bl. April 2014)
<b>Ditjen Perhubungan Laut</b>			
Peningkatan Fungsi KPLP	Pembangunan dua unit kapal patroli Kelas IV – Paket A	67,50%	91,03%
	Pembangunan dua unit kapal patroli Kelas IV – Paket B	61,58%	79,92%
<b>Ditjen Perhubungan Udara</b>			
Navigasi Penerbangan	Pengadaan dan pemasangan MSSR Mode S untuk Mutiara Palu	91,81%	91,81%
	Pengadaan dan pemasangan MSSR Mode S untuk Pangkalanbun	90,09%	90,09%
	Pengadaan dan pemasangan MSSR Mode S untuk Kupang dan Biak (Optimalisasi)	95,26%	95,26%
	Pengadaan Enhanced JAATS Engineering System dan Test Bed Serta Flight Commissioning Radar	88,10%	88,10%
<b>Ditjen Perkeretaapian</b>			
Pemb. Jalur Ganda Tanah Abang-Serpong-Maja-Merak	Pembangunan Gardu Traksi di Tiga Raksa	87,70%	87,70%

Selain itu termasuk juga nilai aset atas lima paket pekerjaan pada tiga satker yang belum diselesaikan hingga 31 Desember 2013 dan pembayaran telah direalisasikan sesuai kemajuan pekerjaannya, namun pekerjaan tersebut dilanjutkan pada Tahun 2014. Rincian paket pekerjaan tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

NAMA SATKER	NAMA PAKET	PEMBAYARAN 31-DES-2013	PROGRESS FISIK	
			BAST	%
Badan Pengembangan SDM				
Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut	Pembangunan BP2IP Sorong Tahap IV senilai Rp49.590.000.000,00	99,10%	3 Januari 2014	100%
	Pembangunan BP2IP Padang Pariaman Tahap II senilai Rp70.888.700.000,00	92,75%	18 Februari 2014	100%
	Pembangunan BP2IP Minahasa Selatan Tahap I senilai Rp86.095.000.000,00	99,15%	2 Januari 2014	100%
Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Pembangunan BPPTD Kalimantan Tahap I senilai Rp12.877.032.000,00	91,10%	3 Maret 2014	100%
Dirjen Perhubungan Laut				
Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Perintis Tipe 200 DWT (Paket J) senilai Rp16.850.900.000,00	66,00%	-	66,00%

Untuk paket pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 200 DWT (Paket J) senilai Rp16.850.900.000,00 dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun 2014, dengan kronologi sebagai berikut :

1. Memperhatikan Surat penambahan waktu pembangunan kapal perintis Tipe 200 DWT No. 01/PEMB.KPL/II/2014 tanggal 7 Januari 2014 dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Kapal Perintis kepada Direktur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard;
2. Terdapat Pemutusan Kontrak oleh PPK Pembangunan Kapal Perintis yang tertuang dalam Surat Nomor 01/PEMB.KPL/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Pemutusan Kontrak Kapal Perintis Tipe 200 DWT (Paket J) yang dibangun di PT. Sanur Marindo Shipyard, Tegal;
3. Pada tanggal 25 Februari 2014 Direktur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard menyampaikan surat mengenai Perkembangan Kemajuan Pekerjaan Kapal Tipe 200 DWT (Paket J) yang memberitahukan bahwa progress pembangunan kapal telah mencapai 80 %;
4. Selanjutnya adanya permohonan dari Direktur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard untuk memohon kebijaksanaan peninjauan kembali pemutusan kontrak kapal perintis tipe 200 DWT (Paket J) tertuang dalam surat nomor 287-SMS-PRT/SPP-200/II/2014 tanggal 3 Maret 2014;
5. Pada tanggal 3 Maret 2014, Direktur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard menyampaikan perkembangan kemajuan pembangunan kapal perintis Tipe 200 DWT (Paket J) telah mencapai 90 %;

### C.3 PIUTANG JANGKA PANJANG

TP/TGR

Rp412.578.733,-

#### C.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp412.578.733,- dan Rp479.001.363,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Tabel 42.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-13	31-Des-12	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	328.355.976	363.749.406	(35.393.430)
05	Ditjen Perhubungan Udara	84.222.757	115.251.957	(31.029.200)
	<b>Total</b>	<b>412.578.733</b>	<b>479.001.363</b>	<b>(66.422.630)</b>

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih  
TP/TGR  
(Rp16.085.073)

#### C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar (Rp16.085.073,-) dan (Rp1.653.998,-) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Tabel 43.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-13	31-Des-12	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	(15.663.959)	(1.077.738)	(14.586.221)
05	Ditjen Perhubungan Udara	(421.114)	(576.260)	155.146
	<b>Total</b>	<b>(16.085.073)</b>	<b>(1.653.998)</b>	<b>(14.431.075)</b>

*Aset Lainnya*  
Rp3,69 Triliun

## C.4 ASET LAINNYA

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.696.717.507.301,- dan Rp4.071.774.581.032,-. Nilai Aset Lainnya ini sudah termasuk Nilai Aset Lainnya pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp79.538.904.669,- yang terdapat pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dibandingkan dengan 31 Desember 2012 yang disebabkan terdapat akumulasi penyusutan/amortisasi untuk Aset Lain-lain sebesar Rp529.978.804.987,-.

Tabel 44.

### Rincian Aset Lainnya

Aset Lainnya	31-Des-13	31-Des-12	Kenaikan / (penurunan)
Aset Tak Berwujud	Rp 2.206.683.977.132	Rp 1.928.568.236.690	Rp 278.115.740.442
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Rp 16.045.930.645	Rp -	Rp 16.045.930.645
Aset Lain-lain	Rp 2.003.966.404.511	Rp 2.143.206.344.342	Rp (139.239.939.831)
Total	Rp 4.226.696.312.288	Rp 4.071.774.581.032	Rp 154.921.731.256
Akm. Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	Rp (529.978.804.987)	Rp -	Rp (529.978.804.987)
Nilai buku	Rp 3.696.717.507.301	Rp 4.071.774.581.032	Rp (375.057.073.731)

*Aset Tak Berwujud*  
Rp2,20 Triliun

### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dan adalah sebesar Rp2.206.683.977.132,- dan Rp1.928.568.236.690,-. Nilai aset tak berwujud tersebut sudah termasuk Aset Tak Berwujud pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp76.395.841.868,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel 45.

### Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-13
1	Sekretaris Jenderal	Rp 169.929.650.804
2	Inspektorat Jenderal	Rp 3.312.638.100
3	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 463.587.784.429
4	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 153.546.274.568
5	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 182.857.494.199
6	Ditjen Perkeretaapian	Rp 693.826.845.456
7	Badan Litbang Perhubungan	Rp 309.164.839.493
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 230.458.450.083
	Total	Rp 2.206.683.977.132

Tabel 46.  
Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Jenisnya

No	Uraian	Rupiah
1	Hak Cipta	181.447.000
2	Paten	23.167.000
3	Software	208.635.475.504
3	Lisensi	13.705.286.364
4	Hasil Kajian/Penelitian	591.098.834.592
5	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.393.039.766.672
	<b>Total</b>	<b>2.206.683.977.132</b>

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>1.928.568.236.690</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Penambahan Saldo Awal	22.190.882.100
Pembelian	83.637.987.664
Transfer Masuk	1.757.833.820
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	180.169.558.742
Reklasifikasi Masuk	16.648.750.740
Perolehan Lainnya	31.749.751.600
Penyelesaian Pembangunan Langsung	854.385.000
Pengembangan Nilai Aset	12.478.571.500
Pengembangan Melalui KDP	2.267.301.201
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	9.501.663.570
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-13.792.874.164
Penghapusan	-5.129.811.500
Transfer Keluar	-9.155.282.000
Reklasifikasi Keluar	-54.893.467.331
Koreksi Pencatatan	-169.510.500
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>2.206.683.977.132</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013</b>	<b>0</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>2.206.683.977.132</b>

Aset Tak  
Berwujud dalam  
Pengerjaan  
Rp16.045 Miliar

#### C.4.2 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp16.045.930.645,- dan Rp0,- Akun ini merupakan akun baru di tahun 2013.

*Aset Lain-Lain*  
*Rp2.003 Triliun*

### C.4.3 Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.003.966.404.511,- dan Rp2.143.206.344.342,- yang merupakan barang milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Perhubungan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Nilai Aset Lain-lain tersebut sudah termasuk Aset Lain-lain pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp3.143.062.801.

Selain itu terdapat mutasi tambah antara lain dari aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa tanah pada Ditjen Perkeretaapian pada Satker *Double-Double Track* (DDT) senilai Rp21.726.090.000 yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak didukung bukti kepemilikan dan masih dalam proses penyidikan KPK.

Aset Lain-Lain ini adalah hasil reklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya, diharapkan dalam waktu dekat akan diajukan penghapusannya kepada pengelola barang.

## KEWAJIBAN

### C.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

*Utang kepada*  
*Pihak Ketiga*  
*Rp427,06 Miliar*

#### C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp427.063.813.222,- dan Rp103.357.423.491,- merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Tabel 47.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I

Eselon I	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Utang kepada pihak ketiga lainnya
Sekretariat Jenderal;	Rp 422.359.489.360		
Inspektorat Jenderal	Rp 4.404.412		
Ditjen Perhubungan Darat			Rp 238.467.704
Ditjen Perhubungan Laut	Rp 1.060.261.687	Rp 287.901.463	Rp .
Ditjen Perhubungan Udara	Rp 82.184.002	Rp 1.392.135.511	
Ditjen Perkeretaapian		Rp 29.622.820	
Badan PSDM Perhubungan	Rp 7.194.102	Rp 1.602.152.161	
<b>Total</b>	<b>Rp423.513.533.563</b>	<b>Rp 3.311.811.955</b>	<b>Rp 238.467.704</b>

*Pendapatan  
Diterima Dimuka  
Rp22,24 Miliar*

### C.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 22.241.989.715,- dan Rp 19.802.839.526,- merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan.

Tabel 48.  
Rincian Pendapatan Diterima di Muka

No.	Eselon I	TA 2013	TA 2012
1	Sekretariat Jenderal	Rp 103.091.969	Rp 3.703.754
2	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 112.950.000	Rp -
3	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 135.293.174	Rp 76.370.985
4	Ditjen Perkeretaapian	Rp 820.376.328	Rp -
4	Badan Litbang Perhubungan	Rp -	Rp 120.000.000
5	Badan PSDM Perhubungan	Rp 21.070.278.244	Rp 19.602.764.787
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 22.241.989.715</b>	<b>Rp 19.802.839.526</b>

*Uang Muka dari  
KPPN Rp1,16  
Miliar*

### C.5.3 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.167.058.545,- dan Rp810.754.169,- merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

*Pendapatan yang  
Ditangguhkan  
Rp10,12 Miliar*

### C.5.4 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp10.124.795.498,- dan Rp19.102.564.776,- merupakan PNPB yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Di Bendahara Penerimaan dan Akun Kas Lainnya dan Setara Kas.

## EKUITAS

*Ekuitas Dana  
Lancar  
Rp659,12 Miliar*

### C.6 EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 49.

Tabel 49.  
Rincian Ekuitas Dana Lancar

No.	Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
1	Cadangan Piutang	R p 176.260.705.739	R p 407.430.093.384
2	Cadangan Persediaan	R p 266.937.363.154	R p 156.094.840.054
3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek	R p (4.645.060.172)	R p (103.181.868.640)
4	Dana Lancar BLU	R p 218.175.501.077	R p 161.040.871.577
5	Ekuitas Dana Lancar Lainnya	R p 2.193.289.391	R p 3.080.936.942
6	Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	R p 22.436.691.867	R p 19.995.697.553
7	Barang/Jasa yang Masih harus Diserahkan	R p (22.241.989.715)	R p (19.802.839.526)
	<b>Jumlah</b>	<b>R p 659.116.501.341</b>	<b>R p 624.657.731.344</b>

*Cadangan Piutang  
Rp 176.26 Miliar*

### C.6.1 Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp176.260.705.739,- dan sebesar Rp407.430.093.384,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, dan Uang Muka Belanja dan merupakan nilai netto setelah dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

*Cadangan  
Persediaan  
Rp266.94 Miliar*

### C.6.2 Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp266.937.363.154,- dan Rp156.094.840.054,- merupakan ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan dan Persediaan Badan Layanan Umum.

*Dana yang harus  
Disediakan untuk  
Pembayaran Utang  
Jangka Pendek  
(Rp4,64 Miliar)*

### C.6.3 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Nilai Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar (Rp4.645.060.172,-) dan (Rp103.181.868.640,-) merupakan bagian dari ekuitas yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan.

*Dana Lancar BLU  
Rp 218,17 Miliar*

### C.6.4 Dana Lancar BLU

Nilai Dana Lancar BLU per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 218.175.501.077,- dan Rp 161.040.871.577,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar pada Badan Layanan Umum yang terdapat pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Kas Pada BLU.

*Ekuitas Dana  
Lancar Lainnya  
Rp2,19 Miliar*

### **C.6.5 Ekuitas Dana Lancar Lainnya**

Nilai Ekuitas Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 2.193.289.391,- dan Rp 3.080.936.942,-. Merupakan penyeimbang dari Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari saldo hibah langsung.

Saldo hibah langsung Rp2.193.289.391,- terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut atau sebesar USD179,940.06 (kurs Rp 12.189,-) yaitu pada satker Pengembangan Kenavigasian yang terdiri dari :

- Rekening Giro Penampungan ANF Bank BNI Cabang Harmoni Nomor Rekening 0165113802 sebesar USD 143,422.92.
- Rekening Giro Penampungan NORAD Bank BNI Cabang Harmoni Nomor Rekening 220214025 sebesar USD 36,517.14.

*Barang/Jasa Yang  
Harus Diterima  
Rp22.44,-*

### **C.6.6 Barang/Jasa Yang Harus Diterima**

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diterima per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 22.436.691.867,- dan Rp 19.995.697.553,- merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang masih harus diterima dari pihak lain. Akun ini merupakan penyeimbang dari akun Belanja Dibayar Dimuka (prepaid).

*Barang/Jasa Yang  
Harus Diserahkan  
(Rp22,24 Miliar)*

### **C.6.7 Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan**

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar (Rp22.241.989.715,-) dan (Rp19.802.839.526,-) Merupakan penyeimbang dari akun Pendapatan Diterima Dimuka berupa Barang/Jasa yang masih harus diserahkan kepada pihak lain.

*Ekuitas Dana  
Investasi  
Rp147.20 Miliar*

### **C.7 EKUITAS DANA INVESTASI**

Ekuitas Dana Investasi merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di Aset Tetap, Aset Lainnya dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian nilai Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 50.

Tabel 50.  
Rincian Ekuitas Dana Investasi

No.	Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp 143.507.204.560.291	Rp 158.623.798.919.876
2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	Rp 3.697.114.000.961	Rp 4.072.251.928.397
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 147.204.318.561.252</b>	<b>Rp 162.696.050.848.273</b>

*Diinvestasikan  
Dalam Aset Tetap  
Rp143,51 Triliun*

### C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp143.507.204.560.291,- dan Rp158.623.798.919.876,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap

*Diinvestasikan  
Dalam Aset Lainnya  
Rp3,67 Triliun*

### C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 3.697.114.000.961,- dan Rp 4.072.251.928.397,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

## D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat penyetoran ke Kas Negara pada Tahun 2014 berupa :

- a. Kelebihan pembayaran pada Satker Prasarana Jabotabek atas temuan Inspektorat Jenderal sebesar Rp13.600.980,- yang telah disetorkan ke kas negara pada bulan Februari 2014.
- b. Temuan BPK RI pada Satker Prasarana Perkeretaapian Jawa Barat senilai Rp3.178.144.500,- berupa pemahalan harga dan kekurangan volume yang telah disetorkan ke kas negara pada bulan Januari 2014.

Terhadap penyetoran tersebut telah dilakukan pencatatan ke dalam Akun Bagian Lancar TP/TGR dan mengoreksi akun Aset Tetap pada Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2013 (*Unaudited*).

### D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Daftar temuan dan rekomendasi Badan pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dalam Laporan Keuangan Pendukung (Buku II).

### D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar Informasi pendapatan dan belanja akrual sebagaimana terlampir.

### D.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kementerian Perhubungan sebagaimana terlampir dalam Laporan Keuangan Pendukung (Buku II).

### D.5 CATATAN PENTING LAINNYA

1. Pada Ditjen Perhubungan Laut terdapat temuan pemeriksaan BPK tahun 2011 berupa piutang PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelni (Persero) sebesar Rp9.261.071.618,70 dan USD102,585.09 atau Setara Rp10.191.313.214,82 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya, dengan rincian :
  - a) Piutang Bukan Pajak PT. Pertamina (Persero) untuk Tahun 2005 dan 2006 senilai Rp1.341.415.370,70 dan USD 16.621,94 yang terakumulasi pada 13 satker;
  - b) Piutang Bukan Pajak yang belum dapat diidentifikasi wajib bayarnya senilai Rp6.338.780.918,00 dan USD85.963,15;
  - c) Piutang Bukan Pajak PT. Pelni (Persero) pada tahun 2005 dan 2008 senilai Rp1.580.875.330,00.

Terhadap piutang ini Kementerian Perhubungan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut telah menindaklanjuti dengan menerbitkan invoice kepada Vice President Marine Shipping Pertamina Perkapalan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp. 3.665.038.076 dan USD60,285.38 untuk Tahun 2005 dan Rp. 2.673.742.842 dan USD 25,677.77 untuk Tahun 2006 sesuai surat Nomor KU 207/1/16/DJPL-12 tanggal 3 Desember 2012, dan PT Pertamina telah melunasi atas invoice tersebut.

Namun atas piutang PT. Pertamina (Persero) senilai Piutang Bukan Pajak PT. Pertamina (Persero) untuk Tahun 2005 dan 2006 senilai Rp1.341.415.370,70 dan USD 16.621,94 yang terakumulasi pada 13 satker dan piutang PT. Pelni (Persero) senilai pada tahun 2005 dan 2008 senilai Rp1.580.875.330,00, Kementerian Perhubungan tidak dapat

menerbitkan invoice karena terkendala data dukung. Sebagai langkah tindak lanjut Kementerian Perhubungan telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan surat nomor KU.202/63/22 Phb 2013 tanggal 24 April 2013 perihal Piutang PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelni (Persero).

Surat Ditjen Kekayaan Negara dengan surat Nomor S-802/KN/2013 tanggal 7 Juli 2013 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa permasalahan piutang tersebut lebih pada masalah akuntansi piutang yang terkait dengan tupoksi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sehingga surat dari Kementerian Perhubungan telah diteruskan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan.

Kementerian Perhubungan menyusuli kembali dengan surat Nomor PS.313/1/8 Phb 2013 tanggal 12 Nopember 2013 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang meminta kembali agar Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memberi jawaban terhadap surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah menjawab surat Kementerian Perhubungan melalui surat Nomor S-8136/PB/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Perlakuan Akuntansi atas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelni (Persero), yang menyatakan bahwa terkait piutang Kementerian Perhubungan kepada PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelni (Persero), sebagai berikut :

- a. Sepanjang hasil verifikasi diantara pihak yang menunjukkan piutang tersebut tidak ditemukan dan tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai, agar dinyatakan dalam surat pernyataan bersama secara tertulis antara Kementerian Perhubungan dengan PT. Pertamina (Persero) maupun dengan PT. Pelni (Persero);
- b. Selanjutnya surat pernyataan bersama tertulis tersebut, dapat dijadikan dasar mengkoreksi/mengeluarkan piutang dimaksud dari neraca, serta Kementerian Perhubungan mengkomunikasikan hal ini kepada Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, diadakan pertemuan dengan pihak PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelni (Persero) sesuai dengan undangan rapat Nomor UM.202/64/13 Phb 2013 tanggal 19 Desember 2013. Pada pertemuan tersebut baik pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maupun pihak PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pelni (Persero) tidak mempunyai dokumen sumber yang memadai untuk piutang senilai Rp1.341.415.370.70 dan USD16.621.94 dan Rp1.322.673.447,-.

Sehingga pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, PT. Pertamina (Persero) dan juga PT. Pelni (Persero) sepakat menyatakan bahwa piutang PNBP Jasa Transportasi Laut senilai Rp1.341.415.370.70 dan USD 16.621.94 dan Rp1.322.673.447 tidak ditemukan dan tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai. Posisi saat ini telah dikoreksi dari neraca.

2. Terhadap temuan pemeriksaan BPK RI Tahun 2010 pada Satker Double-Double Track (aspek yang menjadi pengecualian pada Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan) berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Tanah senilai Rp21.726.090.000,-, Kemenhub telah melakukan reklasifikasi akun KDP tersebut dalam akun Aset Lain-lain dalam kelompok Aset Lainnya.
3. Terhadap utang kepada pihak ketiga pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Barat Ditjen Perkeretaapian senilai Rp76.884.009.850,00, yang belum dapat diyakini kewajarannya, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti dengan mengajukan surat permohonan verifikasi kepada BPKP dengan surat nomor KU 307/I/III/Phb/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Permohonan Verifikasi Utang Kepada Pihak Ketiga pada Kemenhub Tahun 2011 dan nomor KU 307/I/4 Phb 2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Permohonan Verifikasi Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pembuatan Lokomotif beserta Repowering (KRL) pada Kemenhub Tahun 2011. Terhadap permohonan verifikasi Kemenhub, BPKP telah menugaskan kepada Perwakilan BPKP Jawa Barat untuk melakukan verifikasi dengan surat nomor S-240/D1.03/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Verifikasi Utang Kepada Pihak Ketiga pada Direktorat

Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2011 dan telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi. Hasil verifikasi BPKP sesuai surat nomor SP-27/D1.03/2013 tanggal 30 Mei 2013 bahwa nilai piutang yang dapat diakui adalah sebesar Rp36.381.606.589,00 belum memperhitungkan (mengurangkan) nilai item pekerjaan angkat listring dengan MTT yang disubkontrakkan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung senilai Rp331.950.000,00.

Nilai piutang sesuai hasil verifikasi BPKP telah disajikan dalam neraca dan dilakukan pembayaran sebesar Rp36.381.606.589,-.

4. Terhadap hasil temuan BPK RI Tahun 2012 pada Ditjen Perhubungan Darat berupa :
  - a. Ditjen Perhubungan Darat belum optimal dalam melakukan proses penetapan status hibah dan/atau penghapusan aset yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda sekurang-kurangnya senilai Rp1.265.578.948.437,-.
  - b. Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan terdapat aset senilai Rp538.651.000,- tidak didukung dokumen untuk proses serah terima kepada pihak PEMDA dan/atau proses penghapusan.

Atas temuan tersebut, Ditjen Perhubungan Darat telah membentuk Tim Penyelesaian Aset dan melakukan identifikasi aset-aset yang diserahkan kepada PEMDA/masyarakat dan telah melakukan penelusuran terhadap dokumen terkait aset untuk dilakukan proses penetapan status hibah dan/atau proses penghapusannya.

Saat ini Ditjen Perhubungan Darat telah menindaklanjuti sekurang-kurangnya senilai Rp660.735.181.859,- dan yang belum diusulkan penghapusan asetnya senilai Rp604.843.766.578,-.

Terhadap sisa temuan yang belum diselesaikan, Setditjen Perhubungan Darat telah berkoordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan pada tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penyelesaian Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan TA. 2012.

Untuk nilai sebesar Rp538.651.000,- pada Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan, Satker telah mengajukan usulan penghapusan kepada KPKNL Banjarmasin sesuai dengan surat Nomor 151/P.AJ-KS/05/2013 tanggal 1 Oktober 2013.

5. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK nomor 141/S/III-XIV.3/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2011 pada Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Jawa Barat, ditemukan adanya unsur perbuatan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa seperti diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 terkait proses perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran pekerjaan atas pelaksanaan anggaran kegiatan tahun 2011 yang mengakibatkan kerugian negara. Temuan ini diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

Adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan barang dan jasa tersebut mengakibatkan BPK tidak meyakini kewajaran dari aset tetap Peralatan dan Mesin serta aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sehingga menjadi pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2012.

Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti temuan tersebut sebagai berikut :

- a. Sudah dilakukan penyelesaian pekerjaan dan telah dilakukan reviu BPKP.
- b. Telah dikenakan denda sebesar Rp4.991.368.100 pada 31 perusahaan dan seluruhnya telah disetor ke Kas Negara
- c. Telah dikenakan denda sebesar Rp4.991.368.100,- pada 31 perusahaan dan seluruhnya telah disetor ke Kas Negara.
- d. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp29.392.146.581,00 terdiri dari kurang volume balas senilai Rp2.142.105.000,00 dan kurang volume item pekerjaan senilai Rp27.250.041.581,00
- e. Atas kekurangan volume, sebesar Rp22.550.588.195 diselesaikan dengan penyelesaian pekerjaan
- f. Sedangkan sisanya sebesar Rp6.841.558.386 telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

- g. Sesuai saran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pekerjaan instalasi/ pemasangan komponen perlu dilanjutkan sehingga pada tahun 2014 telah dianggarkan dalam DIPA agar dapat bermanfaat.
- h. Diinformasikan bahwa hasil pengadaan senilai Rp15.475.380.000 (sebelum PPN) saat ini disimpan di Gudang PT. Eltran
- i. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis telah diselesaikan
- j. Atas pemahalan harga senilai Rp2.673.652.880 seluruhnya telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara

Adapun atas temuan tersebut telah dilakukan penyesuaian neraca sebagai berikut :

- a. Melakukan pencatatan pada Laporan Realisasi Anggaran untuk penyetoran kekurangan volume, dan pemahalan harga yang disetor tahun 2013.
  - b. Mencatat sebagai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penyetoran yang dilakukan tahun 2014.
  - c. Telah dilakukan koreksi atas pencatatan neraca sebesar nilai kekurangan volume dan pemahalan harga yang disetor ke kas negara pada Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2013 (*Unaudited*).
6. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI sesuai Surat Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) nomor 66/S/III-XIV.3/11/2013 tanggal 25 November 2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2013 yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Cirebon – Kroya, Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Tengah, terdapat temuan sebagai berikut :
- a. Penilaian dokumen penawaran pada proses pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Satker Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya kurang sesuai ketentuan, mengakibatkan hasil akhir pelelangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya;

- b. Fungsi Pengendalian dan Reviu atas Kemajuan Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan Kereta Api oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan Satker Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya tidak berjalan dengan optimal, mengakibatkan hasil perhitungan volume pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, pengadaan sub balas, dan pengadaan balas dalam dokumen Request for Measurement (RFM) sebagai salah satu persyaratan dokumen pengajuan pembayaran belum dapat diyakini keakuratannya;
- c. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Termin I atas Pekerjaan Jalan dan Jembatan tidak diverifikasi dan tidak dilengkapi dengan data pendukung sesuai dengan ketentuan, mengakibatkan pembayaran Termin I belum dapat diyakini kewajarannya;
- d. Potensi kelebihan pembayaran untuk Pekerjaan Pembersihan/Stripping pada pembangunan Jalan Kereta Api KM 254+000 – KM 257+000 sepanjang 3.000 M' sp antara Ciledug – Ketanggungan Barat sebesar Rp1.229.779.200;
- e. Potensi kelebihan pembayaran untuk Pekerjaan Tanah pada Pembangunan Jalan Kereta Api Km 251+000 – Km 254+000 sepanjang 3.000 M'sp antara Ciledug- Ketanggungan Barat sebesar Rp1.415.287.048;
- f. Potensi kelebihan pembayaran untuk Pekerjaan Track pada Paket Pembangunan Jalan Kereta Api yang dibiayai SBSN sebesar Rp874.389.180,50.

Terhadap temuan tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebagai berikut :

- 1) Dirjen Perkeretaapian telah memberikan teguran tertulis sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA/PPK agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku dengan Surat no. PS.313/A-23/DJKA/2/14 tanggal 7 Pebruari 2014.

- 2) KPA Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya telah memberikan sanksi administratif berupa surat teguran kepada Pokja ULP Satker terkait atas ketidakcermatannya dalam melaksanakan proses pelelangan dengan Surat No. 661/PJGC/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013.
- 3) KPA Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya telah memberikan sanksi administratif berupa surat teguran kepada Konsultan MK, Quality Control dan Pengawas Lapangan/Inspektorat Satker, serta Kontraktor Pelaksana untuk lebih tertib dan cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku dengan Surat No. 662/PJGC/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013, Surat No. 663/PJGC/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013, Surat No. 664/PJGC/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013, Surat No. 665/PJGC/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013, Surat No. 666/PJGC/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013, Surat No. 667/PJGC/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013, Surat No. 668/PJGC/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013.
- 4) KPA Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya telah memberikan sanksi administratif berupa surat teguran kepada TIM penyusun HPS agar lebih cermat dalam melakukan perhitungan volume pekerjaan track untuk masing-masing kontrak dengan Surat No. 669/PJGC/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013.
- 5) KPA Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya telah melakukan addendum kontrak terkait potensi kelebihan bayar pekerjaan terpasang.

LAPORAN PENYUSUTAN PENGGUNATAHUNAN  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2013

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2013			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
<b>131111</b>	<b>TANAH</b>		<b>316,160,554</b>	<b>58,654,409,753,031</b>	<b>0</b>	<b>58,654,409,753,031</b>
2.01.01	TANAH PERSIL	M2	21,742,647	4,044,435,681,909	0	4,044,435,681,909
2.01.02	TANAH NON PERSIL	M2	1,054,715	367,767,710,004	0	367,767,710,004
2.01.03	LAPANGAN		293,363,192	54,242,206,361,118	0	54,242,206,361,118
<b>132111</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		<b>3,167,718</b>	<b>24,804,482,901,976</b>	<b>10,223,489,236,312</b>	<b>14,580,993,665,664</b>
3.01.01	ALAT BESAR DARAT	Unit	675	255,632,007,293	130,209,434,261	125,422,573,032
3.01.02	ALAT BESAR APUNG	Unit	9	646,220,800	260,371,538	385,849,262
3.01.03	ALAT BANTU	Unit	3,633	313,809,914,650	172,399,454,322	141,410,460,328
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		6,144	2,462,322,052,025	1,006,440,145,221	1,455,881,906,804
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		1,392	661,396,346,222	605,281,403,825	56,114,942,397
3.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Unit	2,401,092	3,632,467,145,466	1,596,932,429,230	2,035,534,716,236
3.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Unit	168	17,982,929,095	10,256,854,369	7,726,074,726
3.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA		77	964,039,319,602	251,447,274,197	712,592,045,405
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Buah	3,512	626,678,839,050	120,622,476,347	506,056,362,703
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Buah	3,243	49,931,392,885	25,962,840,874	23,968,552,011
3.03.03	ALAT UKUR	Buah	4,037	404,710,090,078	211,517,664,548	193,192,425,530
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Buah	106,647	74,344,033,862	33,425,314,956	40,918,718,906
3.05.01	ALAT KANTOR	Buah	64,823	1,907,401,920,382	661,625,836,727	1,245,776,083,655
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	337,588	777,450,301,611	347,704,330,574	429,745,971,037
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	11,232	218,855,336,951	143,374,387,149	75,480,949,802
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		14,939	1,183,492,799,925	711,079,995,453	472,412,804,472
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Buah	3,021	376,139,468,345	141,221,937,203	234,917,531,142
3.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI		45,181	1,576,817,027,633	399,575,561,773	1,177,241,465,860
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Buah	7,763	388,337,787,943	257,352,754,553	130,985,033,390
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	Buah	1,285	16,556,065,495	9,875,449,797	6,680,615,698
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		25,043	2,276,740,701,633	1,060,533,901,540	1,216,206,800,093
3.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Buah	1,009	32,007,891,279	7,804,502,211	24,203,389,068
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Buah	2,633	119,420,024,817	29,838,348,139	89,581,676,678
3.08.04	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Buah	161	52,099,422,219	19,308,396,981	32,791,025,238
3.08.05	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Buah	230	151,273,943,078	41,086,632,339	110,187,310,739
3.08.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Buah	489	78,417,549,484	66,032,198,387	12,385,351,097
3.08.07	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Buah	59,440	1,209,920,409,424	121,205,141,856	1,088,715,267,568
3.08.08	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	Buah	1,353	141,849,659,190	30,278,029,460	111,571,629,730
3.09.01	SENJATA API	Buah	529	124,391,854,000	46,186,760,134	78,205,093,866
3.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Buah	2,578	124,318,184,110	84,339,586,403	39,978,597,707
3.09.03	SENJATA SINAR		19	166,902,501,999	91,178,032,866	75,724,469,133
3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Buah	980	140,202,975,810	78,406,249,573	61,796,726,237
3.10.01	KOMPUTER UNIT		21,207	342,230,871,381	207,703,549,921	134,527,321,460

LAPORAN PENYUSUTAN PENGGUNATAHUNAN  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2013

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2013			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		13,497	408,435,897,061	277,466,011,119	130,969,885,942
3.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI		103	9,764,617,754	5,633,032,454	4,131,585,300
3.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA		124	52,474,255,905	20,883,472,995	31,590,782,910
3.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	Buah	3	2,339,000	2,045,000	294,000
3.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN		48	371,512,436	122,657,570	248,854,866
3.13.01	SUMUR		24	4,370,581,824	726,734,404	3,643,847,420
3.13.02	PRODUKSI		3	110,880,000	16,632,000	94,248,000
3.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		34	18,397,865,850	1,375,856,679	17,022,009,171
3.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI		3	304,895,000	170,223,500	134,671,500
3.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI		2	969,210,000	63,327,000	905,883,000
3.15.01	ALAT DETEKSI		453	11,022,910,787	6,709,142,119	4,313,768,668
3.15.02	ALAT PELINDUNG		2,422	4,685,488,711	2,593,657,329	2,091,831,382
3.15.03	ALAT SAR		5,974	22,877,251,093	16,985,922,330	5,891,328,763
3.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN		1,642	1,126,825,228,921	186,802,850,689	940,022,378,232
3.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		1,266	686,912,088,924	102,339,032,171	584,573,056,753
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Buah	1,372	48,771,560,303	18,976,700,690	29,794,859,613
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Unit	6,389	1,129,930,256,807	572,976,968,073	556,953,288,734
3.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA		1,083	386,026,941,268	279,120,123,587	106,906,817,681
3.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT		7	4,989,313,200	212,832,309	4,776,480,891
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	Buah	1,135	18,452,789,395	9,844,767,567	8,608,021,828
6.02.03	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	Buah	2	30,000	0	30,000
<b>133111</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		<b>19,990</b>	<b>10,945,659,366,200</b>	<b>1,879,421,989,139</b>	<b>9,066,237,377,061</b>
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Unit	87	62,297,262,451	34,597,380,987	27,699,881,464
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		8,787	7,868,447,123,733	1,197,835,007,043	6,670,612,116,690
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		7,585	1,134,045,769,755	283,298,111,256	850,747,658,499
4.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI		4	548,123,112	6,471,232	541,651,880
4.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN		2,409	1,191,322,518,719	317,970,086,936	873,352,431,783
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Unit	1,118	688,998,568,430	45,714,931,685	643,283,636,745
<b>134111</b>	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>		<b>810,779,731</b>	<b>62,189,232,210,494</b>	<b>29,688,976,794,273</b>	<b>32,500,255,416,221</b>
5.01.01	JALAN	M2	808,381,968	43,998,609,766,834	27,665,958,118,021	16,332,651,648,813
5.01.02	JEMBATAN	M2	2,397,763	18,190,622,443,660	2,023,018,676,252	16,167,603,767,408
<b>134112</b>	<b>IRIGASI</b>		<b>12,080</b>	<b>5,479,283,436,777</b>	<b>1,502,609,901,038</b>	<b>3,976,673,535,739</b>
5.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI		8,682	376,166,217,390	215,441,647,291	160,724,570,099
5.02.02	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	Unit	15	338,448,530,749	73,108,053,296	265,340,477,453
5.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Unit	107	404,506,752,212	26,321,705,886	378,185,046,326
5.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Unit	2,515	4,126,756,667,329	1,155,377,108,896	2,971,379,558,433
5.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Unit	205	48,328,688,506	10,433,415,412	37,895,273,094
5.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Unit	435	52,418,140,388	12,712,668,475	39,705,471,913

LAPORAN PENYUSUTAN PENGGUNATAHUNAN  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2013

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2013			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
5.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR		121	132,658,440,203	9,215,301,782	123,443,138,421
<b>134113</b>	<b>JARINGAN</b>		<b>4,888</b>	<b>3,931,741,048,495</b>	<b>483,282,045,400</b>	<b>3,448,459,003,095</b>
5.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU		1,175	31,542,127,643	5,404,887,365	26,137,240,278
5.03.02	INSTALASI AIR KOTOR		10	958,380,000	435,167,326	523,212,674
5.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Unit	2	651,750,400	233,762,560	417,987,840
5.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Unit	314	53,829,299,175	11,941,893,084	41,887,406,091
5.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK		502	445,231,988,217	51,902,010,436	393,329,977,781
5.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	Unit	1,070	17,587,418,205	3,765,769,352	13,821,648,853
5.03.09	INSTALASI PENGAMAN	Unit	22	8,973,663,813	1,737,719,449	7,235,944,364
5.03.10	INSTALASI LAIN		403	68,502,448,765	42,760,674,245	25,741,774,520
5.04.01	JARINGAN AIR MINUM		193	1,460,038,824,184	87,575,443,387	1,372,463,380,797
5.04.02	JARINGAN LISTRIK		488	650,741,078,670	61,377,249,914	589,363,828,756
5.04.03	JARINGAN TELEPON		462	1,183,506,225,907	214,121,548,185	969,384,677,722
5.04.04	JARINGAN GAS		247	10,177,843,516	2,025,920,097	8,151,923,419
<b>135111</b>	<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>		<b>421</b>	<b>1,662,562,901,001</b>	<b>249,411,208</b>	<b>1,662,313,489,793</b>
6.07.01	TANAH DALAM RENOVASI		28	297,028,273,127	0	297,028,273,127
6.07.02	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI		101	360,182,063,669	0	360,182,063,669
6.07.03	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI		38	38,711,092,411	249,411,208	38,461,681,203
6.07.04	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI		17	80,978,021,206	0	80,978,021,206
6.07.05	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI		237	885,663,450,588	0	885,663,450,588
<b>135121</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		<b>165,305</b>	<b>448,984,191,388</b>	<b>10,052,357,386</b>	<b>438,931,834,002</b>
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		125,399	407,650,563,032	0	407,650,563,032
6.01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	Buah	59	6,198,838,928	0	6,198,838,928
6.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		37,936	7,796,423,439	0	7,796,423,439
6.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN		1,826	16,098,252,326	10,052,357,386	6,045,894,940
6.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN		82	11,186,620,483	0	11,186,620,483
6.03.01	HEWAN PIARAAN	Ekor	2	600,000	0	600,000
6.05.01	TANAMAN	Buah	1	52,893,180	0	52,893,180
<b>166112</b>	<b>ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN</b>		<b>73,467</b>	<b>1,990,007,745,480</b>	<b>529,978,804,987</b>	<b>1,460,028,940,493</b>
2.01.01	TANAH PERSIL	M2	29,991	21,924,859,728	0	21,924,859,728
2.01.03	LAPANGAN		7,900	11,850,000	0	11,850,000
3.01.01	ALAT BESAR DARAT	Unit	18	217,545,001	214,603,651	2,941,350
3.01.03	ALAT BANTU	Unit	150	1,829,403,002	1,787,898,867	41,504,135
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	748	229,135,911,836	141,930,009,804	87,205,902,032
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		49	2,424,720,550	2,424,720,550	0
3.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Unit	116	268,361,704,293	75,418,960,291	192,942,744,002
3.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Unit	21	151,533,400	151,533,400	0
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN		227	217,778,656	165,717,644	52,061,012
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Buah	325	97,804,875	97,804,875	0
3.03.03	ALAT UKUR	Buah	213	12,039,576,935	10,094,351,035	1,945,225,900

LAPORAN PENYUSUTAN PENGGUNATAHUNAN  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2013

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2013			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Buah	265	140,121,400	140,121,400	0
3.05.01	ALAT KANTOR	Buah	3,431	59,095,843,538	39,170,435,292	19,925,408,246
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	13,239	5,296,583,693	4,984,217,526	312,366,167
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	419	920,866,732	910,949,532	9,917,200
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		646	1,705,510,905	1,693,423,215	12,087,690
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Buah	140	941,835,715	869,455,080	72,380,635
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Buah	214	1,226,636,280	1,222,387,820	4,248,460
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	Buah	51	208,810,600	208,810,600	0
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Buah	483	13,195,610,704	7,508,112,492	5,687,498,212
3.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Buah	14	14,062,400	14,062,400	0
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Buah	15	166,688,550	132,994,792	33,693,758
3.08.04	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Buah	3	506,000	506,000	0
3.08.05	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Buah	9	193,714,000	193,714,000	0
3.08.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Buah	1	21,900,000	21,900,000	0
3.08.07	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Buah	2	232,981,237	80,540,412	152,440,825
3.08.08	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	Buah	14	116,914,000	112,559,000	4,355,000
3.09.01	SENJATA API	Buah	17	14,265,801	23,895,801	-9,630,000
3.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Buah	33	500,001	500,001	0
3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Buah	3	3,570,872,900	3,125,800,650	445,072,250
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	423	3,842,545,654	3,806,691,094	35,854,560
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Buah	431	805,002,237	796,683,051	8,319,186
3.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Buah	7	1,985,600	1,985,600	0
3.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Buah	5	21,583,400	4,936,660	16,646,740
3.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	Buah	1	480,000	480,000	0
3.15.02	ALAT PELINDUNG	Buah	80	99,317,915	99,317,915	0
3.15.03	ALAT SAR	Buah	8	24,348,000	24,348,000	0
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Buah	9	19,596,900	17,946,900	1,650,000
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT		207	82,641,582,418	60,349,141,641	22,292,440,777
3.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Unit	8	1,017,123,476	1,017,123,476	0
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	Buah	161	49,823,000	49,823,000	0
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit	93	190,699,457,483	14,377,454,880	176,322,002,603
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Unit	38	836,475,289	323,007,387	513,467,902
4.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Unit	112	19,388,251,098	5,987,611,617	13,400,639,481
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS		14	5,507,553,000	781,223,820	4,726,329,180
5.01.01	JALAN	M2	1,306	3,522,193,800	1,019,590,470	2,502,603,330
5.01.02	JEMBATAN	M2	6,267	673,713,966,218	38,988,316,274	634,725,649,944
5.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Unit	27	383,748,559,618	109,284,478,375	274,464,081,243

LAPORAN PENYUSUTAN PENGGUNATAHUNAN  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2013

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2013			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
5.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Unit	5	291,235,134	270,911,265	20,323,869
5.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Unit	3	10,530,000	2,568,750	7,961,250
5.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Unit	6	41,834,600	38,014,307	3,820,293
5.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Unit	6	56,925,000	37,164,375	19,760,625
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	Buah	5,427	172,227,900	0	172,227,900
6.01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	Buah	1	6,547,000	0	6,547,000
6.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	Buah	57	11,688,000	0	11,688,000
6.02.03	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	Buah	8	8	0	8
<b>TOTAL</b>				170,106,363,554,842	44,318,060,539,743	125,788,303,015,099



# **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



## **IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)**

**TAHUN ANGGARAN 2013**

KATA PENGANTAR .....	i-ii
INDEKS ISI .....	iii
NERACA .....	1-2
LAPORAN AKTIVITAS .....	3-4
LAPORAN ARUS KAS.....	5-6
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	7
IKHTISAR.....	-1-
❖ LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG .....	

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLU menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Kementerian Perhubungan sebagai salah satu Kementerian / Lembaga yang mempunyai Kantor / Satker Pengelola Keuangan BLU berkewajiban membuat ringkasan / Ikhtisar Laporan Keuangan BLU berdasarkan Ringkasan Laporan Keuangan dan Lembar Muka (face) dari Seluruh Satker BLU di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-67/PB2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan Laporan Keuangan BLU Kementerian Perhubungan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang sistem Akuntansi yang berlaku pada masing-masing satker BLU di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai pedoman dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

Dari 7 (tujuh) satker BLU di lingkungan Kementerian Perhubungan, sampai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 ini disusun, 6 (enam) satker BLU yang sudah memiliki Pedoman/Sistem Akuntansi yang ditetapkan Menteri Perhubungan yaitu :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 78 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP).
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP).
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 97 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (PIP Semarang).
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (PIP Makassar).
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya.

Sedangkan PKTJ Tegal sampai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan ini dibuat, pedoman sistem akuntansi masih dalam proses penyusunan, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU dan Standar Akuntansi Keuangan.

Ringkasan / Ikhtisar Laporan Keuangan BLU Kementerian Perhubungan dikonsolidasikan dari 7 (tujuh) Satker PK BLU, dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Aktivitas menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU. Total pendapatan Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.759.653.000.381,- dan total biaya Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.624.708.640.596,-.
2. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Kementerian / Lembaga mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2013. Jumlah aset per 31 Desember 2013 sebesar Rp.3.241.569.478.123,- , jumlah kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.23.759.226.054,-, dan jumlah ekuitas per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.3.217.810.252.069,-.
3. Posisi Kas Setara Kas per 31 Desember 2013 sebesar Rp.197.866.250.622,- terdiri dari Kas Setara Kas awal sebesar Rp123.352.936.364,- , dan kenaikan bersih kas sebesar Rp.74.513.314.258,-.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Ringkasan/Ikhtisar Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, Februari 2014

An. MENTERI PERHUBUNGAN  
Sekretaris Jenderal,

**LEON MUHAMAD**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19540404 198703 1 001

**NERACA BADAN LAYANAN UMUM  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

	TAHUN 2013 (Rp)	TAHUN 2012 (Rp)
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas Setara Kas Badan Layanan Umum	197.866.250.622	123.352.935.364
Deposito	-	40.000.000.000
Investasi Jangka Pendek	25.023.013.699	-
Piutang	4.475.674.878	1.685.743.420
Penyisihan piutang tak tertagih	(67.395.688)	(57.577.130)
Persediaan Badan Layanan Umum	1.747.368.481	1.605.031.206
Biaya Dibayar di Muka	7.779.833	44.409.416
Piutang Lainnya	-	-
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>229.052.691.825</b>	<b>166.630.542.276</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah Badan Layanan Umum	1.265.972.865.851	1.250.491.053.251
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	1.220.145.295.385	1.325.399.505.060
Peralatan Dan Mesin Badan Layanan Umum	1.064.060.175.937	750.274.970.208
Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum	53.425.385.638	42.434.657.176
Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.622.440.818	13.053.107.171
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum (Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)	17.400.241.482 (693.765.819.712)	56.216.277.370 (354.010.734.539)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>2.941.860.585.399</b>	<b>3.083.858.835.697</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Tak Berwujud	-	-
Aset Lainnya (Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud)	78.857.445.269 (8.201.244.370)	43.472.032.142 (4.393.368.137)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>70.656.200.899</b>	<b>39.078.664.005</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.241.569.478.123</b>	<b>3.289.568.041.978</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>		
Hutang Usaha	521.500	371.017.749
Hutang Pihak Ketiga	459.516.333	582.023.545
Hutang Pajak	7.801.023	(26.668.499)
Hutang kepada KUN	11.400.000	-
Biaya yang masih harus dibayar	922.321.456	418.740.909
Pendapatan Diterima Di Muka	19.307.563.244	16.220.503.903
Pendapatan diterima Di Muka Program Diklat Keterampilan Khusus	483.065.000	6.116.455.538
DKKP Revalidasi	-	813.430.000
Diklat Teknis Transportasi Udara	88.500.000	-
Pendapatan Non Layanan Pendidikan Diterima Di Muka	1.520.149.998	70.000.000
		1
Pendapatan Pembentukan Transportasi Udara	899.887.500	12.550.000

**NERACA BADAN LAYANAN UMUM  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

	TAHUN 2013 (Rp)	TAHUN 2012 (Rp)
Hutang Jangka Pendek Lainnya	58.500.000	58.500.000
Jumlah Kewajiban Lancar	<b>23.759.226.054</b>	<b>24.636.553.146</b>
<b>KEWAJIBAN NON LANCAR</b>		
Hutang Jangka Panjang	-	-
Jumlah Kewajiban Non Lancar	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>23.759.226.054</b>	<b>24.636.553.146</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS TIDAK TERIKAT</b>		
Ekuitas Awal	1.538.749.652.850	1.538.749.652.850
Surplus (Defisit) Tahun lalu	539.369.450.180	563.743.026.955
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	134.262.900.385	159.316.082.098
Ekuitas Donasi	71.108.146.685	6.802.232.811
Penghapusan Aset Tetap	(112.200.000)	(112.200.000)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	874.132.740.436	874.132.740.436
Penurunan Bersih Aset	(29.409.284.467)	(29.409.284.467)
Kenaikan Bersih Aset	43.641.925	-
Jumlah Ekuitas Tidak Terikat	<b>3.128.145.047.994</b>	<b>3.113.222.250.683</b>
<b>EKUITAS TERIKAT TEMPORER</b>		
Ekuitas Terikat Temporer	89.665.204.075	151.709.238.150
Ekuitas Donasi	-	-
Jumlah Ekuitas Terikat Temporer	<b>89.665.204.075</b>	<b>151.709.238.150</b>
<b>EKUITAS TERIKAT PERMANEN</b>		
Ekuitas Terikat Permanen	-	-
Jumlah Ekuitas Terikat Permanen	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3.217.810.252.069</b>	<b>3.264.931.488.833</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>3.241.569.478.123</b>	<b>3.289.568.041.979</b>

Jakarta, Februari 2014  
**A.n. MENTERI PERHUBUNGAN**  
Sekretaris Jenderal,

**LEON MUHAMAD**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19540404 198703 1 001

**LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

	<u>Tahun 2013 (Rp)</u>	<u>Tahun 2012 (Rp)</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Arus Masuk		
Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan	257.035.445.985,00	237.364.505.118,00
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan		
Pendapatan Hibah	-	
Pendapatan APBN	480.605.324.965,00	467.283.107.872,00
Pendapatan Usaha Lainnya	12.022.936.217,00	7.813.219.892,00
Pembayaran Kas pada Pemasok		
Pendapatan diterima dimuka		
<b>TOTAL KAS MASUK DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<u><b>749.663.707.167,00</b></u>	<u><b>712.460.832.882,00</b></u>
Arus Keluar		
Biaya Layanan	(308.906.974.189,00)	(271.181.676.911,00)
Biaya Umum dan Administrasi	(137.937.988.087,00)	(124.202.712.971,00)
Biaya Lainnya	-	10.080.000,00
Pembelian Persediaan	(3.719.870,00)	(422.457.620,00)
Pembayaran Kepada rekanan/pemasok	(1.985.563.585,00)	(1.760.357.099,00)
Pembayaran Pajak	(87.660,00)	(177.554.856,00)
<b>TOTAL KAS KELUAR DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<u><b>(448.834.333.391,00)</b></u>	<u><b>(397.734.679.457,00)</b></u>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<u><b>300.829.373.776,00</b></u>	<u><b>314.726.153.425,00</b></u>
 <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Arus Masuk		
<b>TOTAL KAS MASUK DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>
Arus Keluar		
Perolehan Aset Tetap	(240.734.261.694,00)	(282.698.899.318,00)
Perolehan Investasi Jangka Pendek	14.976.986.301,00	(40.000.000.000,00)
Perolehan Investasi Jangka Panjang	-	
Perolehan Aset Tak Berwujud		
Pengadaan Persediaan		
Perolehan Aset Tetap Lainnya	(558.784.125,00)	(2.056.205.040,00)
<b>TOTAL KAS KELUAR DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<u><b>(226.316.059.518,00)</b></u>	<u><b>(324.755.104.358,00)</b></u>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<u><b>(226.316.059.518,00)</b></u>	<u><b>(324.755.104.358,00)</b></u>

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk		-
TOTAL KAS MASUK DARI AKTIVITAS PENDANAAN		-
Arus Keluar		-
TOTAL KAS KELUAR DARI AKTIVITAS PENDANAAN		-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	<b>74.513.314.258,00</b>	<b>(10.028.950.933,00)</b>
KAS SETARA KAS AWAL	123.352.936.364,00	133.381.887.297,00
KAS SETARA KAS AKHIR	<b>197.866.250.622,00</b>	<b>123.352.936.364,00</b>

Jakarta, Februari 2014  
**A.n. MENTERI PERHUBUNGAN**  
 Sekretaris Jenderal,

**LEON MUHAMAD**  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 19540404 198703 1 001

**LAPORAN AKTIVITAS BADAN LAYANAN UMUM  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

	TAHUN 2013 (Rp)	TAHUN 2012 (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan Jasa Layanan	264.083.046.721,00	240.676.097.823,00
Pendapatan dari Hibah	1.044.280.000,00	0,00
Pendapatan APBN	482.397.705.841,00	466.663.574.632,00
Pendapatan Usaha Lainnya	12.127.967.819,00	7.855.522.092,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN BERSIH</b>	<b>759.653.000.381,00</b>	<b>715.195.194.547,00</b>
<b>BIAYA</b>		
Biaya Layanan		
Biaya Pegawai layanan	152.237.109.648,00	135.001.467.083,00
Biaya Bahan	76.076.883.425,00	75.979.097.302,00
Biaya Jasa Layanan	44.048.813.326,00	28.982.775.695,00
Biaya Pemeliharaan layanan	25.957.110.968,00	14.530.268.301,00
Biaya Penyusutan	85.186.739.793,00	119.459.046.307,74
Biaya Perjalanan Dinas	5.175.183.430,00	5.913.396.253,00
Biaya Daya dan Jasa	8.812.104.717,00	5.852.384.134,00
Biaya Utilitas layanan	258.755.464,00	352.444.000,00
Biaya Peningkatan SDM	1.038.997.750,00	840.605.000,00
Biaya Promosi	522.203.250,00	244.121.400,00
Biaya Lain-lain layanan	1.333.155.706,00	4.102.597.899,00
<b>Jumlah Biaya Layanan</b>	<b>400.647.057.477,00</b>	<b>391.258.203.374,74</b>
Biaya Umum dan Administrasi		
Biaya Pegawai umum	84.943.640.934,00	80.193.819.962,00
Biaya Bahan	20.008.598.214,00	16.252.280.842,00
Biaya Pemeliharaan	11.890.519.869,00	12.064.252.595,00
Biaya Langganan Daya dan Jasa	8.041.304.626,00	7.501.383.978,00
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	86.681.858.508,00	39.766.576.680,26
Biaya Perjalanan Dinas	7.953.828.065,00	5.265.051.525,00
Biaya Utilitas umum	906.499.871,00	1.341.330.000,00
Biaya Peningkatan SDM	2.765.919.075,00	726.977.116,00
Biaya Lain-lain umum	536.740.698,00	828.516.980,00
<b>Jumlah Biaya Umum dan Administrasi</b>	<b>223.728.909.860,00</b>	<b>163.940.189.678,26</b>
Biaya Lainnya		
Biaya Lain-lainnya	332.673.259,00	369.896.302,00
<b>Jumlah Biaya Lainnya</b>	<b>332.673.259,00</b>	<b>369.896.302,00</b>
<b>JUMLAH BIAYA</b>	<b>624.708.640.596,00</b>	<b>555.568.289.355,00</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN</b>	<b>134.944.359.785,00</b>	<b>159.626.905.192,00</b>

**LAPORAN AKTIVITAS BADAN LAYANAN UMUM  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

	TAHUN 2013 (Rp)	TAHUN 2012 (Rp)
<b>KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN</b>		
Keuntungan		
Keuntungan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Keuntungan Selisih Kurs Valas	0,00	0,00
Total Keuntungan	0,00	0,00
 Kerugian		
Kerugian Aset Non Lancar	0,00	0,00
Kerugian Penurunan Nilai Aset Tetap	0,00	0,00
Kerugian Kontinjensi	0,00	(56.188.228,00)
Kerugian Selisih Kurs Valas	0,00	0,00
Total Kerugian	0,00	(56.188.228,00)
 <b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS-POS LUAR BIASA</b>	<b>134.944.359.785,00</b>	<b>159.570.716.964,00</b>
 <b>POS LUAR BIASA</b>		
Keuntungan Pos Luar Biasa	0,00	28.596.060,00
Kerugian Pos Luar Biasa	681.459.400,00	(287.264.059,00)
 <b>SURPLUS (DEFISIT) BRUTO TAHUN BERJALAN</b>	<b>134.262.900.385,00</b>	<b>159.312.048.965,00</b>
Penyetoran (Penaikan) Kas Negara	0,00	4.033.133,00
<b>SURPLUS (DEFISIT) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>134.262.900.385,00</b>	<b>159.316.082.098,00</b>

Jakarta,      Februari 2014  
**A.n. MENTERI PERHUBUNGAN**  
Sekretaris Jenderal,

**LEON MUHAMAD**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19540404 198703 1 001

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BADAN LAYANAN UMUM KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

	<u>TAHUN 2013</u>	<u>TAHUN 2012</u>
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS TIDAK TERIKAT</b>		
Ekuitas Awal	1.538.749.652.850	1.538.749.652.850
Surplus (Defisit) Tahun lalu	539.369.450.180	563.743.026.955
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	134.262.900.385	159.316.082.098
Ekuitas Donasi	71.108.146.685	6.802.232.811
Penghapusan Aset Tetap	(112.200.000)	(112.200.000)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	874.132.740.436	874.132.740.436
Penurunan Bersih Aset	(29.409.284.467)	(29.409.284.467)
Kenaikan Bersih Aset	43.641.925	-
Jumlah Ekuitas Tidak Terikat	<u>3.128.145.047.994</u>	<u>3.113.222.250.683</u>
<b>EKUITAS TERIKAT TEMPORER</b>		
Ekuitas Terikat Temporer	89.665.204.075	151.709.238.150
Ekuitas Donasi	-	-
Jumlah Ekuitas Terikat Temporer	<u>89.665.204.075</u>	<u>151.709.238.150</u>
<b>EKUITAS TERIKAT PERMANEN</b>		
Ekuitas Terikat Permanen	-	-
Jumlah Ekuitas Terikat Permanen	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<u>3.217.810.252.069</u>	<u>3.264.931.488.833</u>

Jakarta,      Februari 2014  
**A.n. MENTERI PERHUBUNGAN**  
Sekretaris Jenderal,

**LEON MUHAMAD**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19540404 198703 1 001

**BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013**

**BA/UAPA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No.	Eselon I	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Realisasi Menurut Basis Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
		Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	32.543.937.400	317.345	0	32.544.254.745	
	02	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9.879.774.100	3.926.600	-	9.883.700.700	SPM dan PERHITUNGAN
		511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	192.645	390	-	193.035	
		511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	712.709.030	178.520	-	712.887.550	
		511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	178.121.684	43.284	-	178.164.968	
		511125	Belanja Tunjangan PPH PNS	245.652.677	185.618	-	245.838.295	
		511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	287.110.000	70.000	-	287.180.000	
	03	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	22.469.695.500	1.928.000	1.340.000	22.470.283.500	BPLJSKB Bekasi
		511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	394.194	372	460	394.106	BPLJSKB Bekasi
		511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.642.813.310	152.450	122.660	1.642.843.100	BPLJSKB Bekasi
		511122	Belanja Tunj. Anak PNS	441.833.256	44.966	41.114	441.837.108	BPLJSKB Bekasi
		511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.395.760.000	-	540.000	1.395.220.000	-
		511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	299.770.000	-	2.600.000	297.170.000	-
		511125	Belanja Tunj. PPh PNS	449.719.129	139.366	229.024	449.629.471	BPLJSKB Bekasi
		511129	Belanja Uang Makan PNS	2.824.982.300	210.042.000	-	3.035.024.300	Satker Setditjen
		522111	Belanja Langganan dan Jasa	909.129.056	22.019.800	20.453.874	910.694.982	Satker Pel. Penyeberangan Kariangau
		522141	Belanja Sewa	6.244.469.858	-	152.083.334	6.092.386.524	Satker KOPP Gilimanuk
	04	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	519.300.840.899	153.678.565	207.078.729	519.247.440.735	REKAP
		511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.961.442	23.753	-	5.985.195	REKAP
		511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	41.342.455.215	5.358.410	40.090	41.347.773.535	REKAP
		511122	Belanja Tunj. Anak PNS	12.630.778.014	1.857.240	16.036	12.632.619.218	REKAP
		511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	8.507.850.000	1.080.000	20.866.149	8.488.063.851	REKAP
		511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	430.300.000	2.871.450	-	433.171.450	REKAP
		511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7.982.480.323	1.057.942	3.145.344	7.980.392.921	REKAP
		511126	Belanja Tunj. Beras PNS	39.163.980.028	25.279.380	-	39.189.259.408	REKAP
		511129	Belanja Uang Makan PNS	100.154.238.209	496.558.600	680.787.970	99.970.008.839	REKAP
		511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	17.319.733.191	23.059.125	-	17.342.792.316	REKAP
		511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	35.349.842.071	890.000	-	35.350.732.071	REKAP
		521111	Belanja Keperluan Perkantoran	43.245.998.046	2.314.500	-	43.248.312.546	REKAP
		522111	Belanja Langganan Listrik	14.708.910.063	189.006.264	137.382.863	14.760.533.464	REKAP
		522112	Belanja Langganan Telepon	2.965.012.859	2.717.740	4.811.543	2.962.919.056	REKAP
		522113	Belanja Langganan Air	2.354.226.508	69.402.959	29.743.755	2.393.885.712	REKAP
		522141	Belanja Sewa	349.754.861	60.000.000	60.000.000	349.754.861	REKAP
		536111	Belanja Modal Lainnya	338.418.190.611	-	21.275.413.328	317.142.777.283	REKAP
	05	212111	Belanja Pegawai Yg Masih Harus Dibayar	332.259.345.969	25.778.702	-	332.233.567.267	
		212112	Belanja Barang Yg Masih Harus Dibayar	981.148.064.310	-	-	981.148.064.310	

No.	Eselon I	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Realisasi Menurut Basis Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
		Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	08	522111	Tagihan Listrik, air dan internet bulan desember 2013	0	11.500.000	-	11.500.000	
		522111	Tagihan Listrik, air dan telepon bulan desember 2013	0	4.244.606	5.772.771	(1.528.165)	
		522111	Tagihan Listrik, air dan telepon bulan desember 2013	0	4.883.353	8.578.008	(3.694.655)	
		522111	Tagihan Listrik, air dan telepon bulan desember 2013	0	3.929.748	8.647.594	(4.717.846)	
		522111	Tagihan Listrik, air dan telepon bulan desember 2013	0	2.491.193	2.777.971	(286.778)	
		522111	Tagihan Listrik dan Telepon bulan Desember 2013	0	2.573.920	800.000	(800.000)	
							-	
	12	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5.107.747.789	7.194.102	-	5.114.941.891	Kekurangan Gaji 2 orang Pegawai Sekretariat BPSDM
		525112	Belnja Barang	16.532.578.276	506.973.807	-	17.039.552.083	Permakanan Taruna

**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013**

**BA/UAPA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No.	Eselon I	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Realisasi Menurut Basis Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
		Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1		2	3	4	5	6	7	8
	02	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	167.827.465	0	103.091.969	64.735.496	
	03	423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan	4.769.046.000	-	9.270.000	4.759.776.000	-
		423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian	1.047.622.888	2.218.679	6.077.440	1.043.764.127	Satker Pel. Penyeberangan Kariangau
	05	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	2.699.748.232		129.071.714	2.570.676.518	
		219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya diterima dimuka	(2.699.748.232)		6.221.460	(2.705.969.692)	
	08	423141	Pendapatan Diterima Dimuka (Sewa lahan)	1.118.695.000	-	298.318.672	820.376.328	
	12	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	27.852.651.082	-	4.713.763.244	23.138.887.838	Pendapatan dr layanan pendidikan
		424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	64.224.417.700	-	787.065.000	63.437.352.700	Pendapatan dr layanan pendidikan
		424112	Pendapatan dari Jasa Layanan Pendidikan	71.485.796.500	-	15.569.450.000	55.916.346.500	Pendapatan dari layanan pendidikan
			<b>TOTAL</b>	<b>170.666.056.635</b>	<b>2.218.679</b>	<b>21.622.329.499</b>	<b>149.045.945.815</b>	